

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI SEKOLAH DASAR (TEORI DAN PRAKTIK)

Dr. Noor Alfulaila, S. Pd,I M. Pd



PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI SEKOLAH DASAR (TEORI DAN PRAKTIK)

ISBN: 978-623-5962-18-4

Penulis : Dr. Noor Alfulaila, S. Pd, I M. Pd
Editor : Dr. Nashrullah, M. Pd
Tatal letak isi &Layout : Usman Jayadi
Penerbit : Kanhaya Karya
Tahun Terbit : 2022

Kantor 1:

Jalan Gotong Royong, Pejarakan Karya

Kantor 2:

Jl. Melati Raya VIII BTN Rembiga

Telp. (0370) 7507612 - HP. 08174752808 / 081238426727

Email: penerbitkakapress@gmail.com - Web: www.kakapress.com

©Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

All right reserved

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Ketentuan Pidana Sanksi Pelanggaran Pasal 72 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan barang atau hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah Swt, atas berkat limpahan rahmat dan karuniaya sehingga buku refrensi ini dengan judul pendidikan multikultural di sekolah dasar. sebagai pedoman bagii mahasiswa, dosen, dan pemerhati penelitian, agar dapat memberikan petunjuk pustaka dan gambaran dalam penyelesaian ataupun lainnya.

Buku ini juga menjelaskan gambaran yang terjadi pada konsep dasar pendidikan, komponen pendidikan multikultural, model dan karakteristik pendidikan multikultural, pendidikan multikultural disekolah dasar, implementasi dan strategi pendidikan multikultural, serta konsep pendidikan berbasis multikultural. Melihat dari gambaran yang ditemukan di lapangan.

Maka dari itu penulis membuat buku ini dari hasil kritisasi pemikiran dan gambaran yang terjadi di lapangan. Kami menyadari bahwa didalam buku ini juga mempunyai kekurangan, namun kami meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun buku ini tetap akan memberikan manfaat yang besar bagi pembaca.

Akhir kata, semoga buku ini bermakna bagi perkembangan penelitian pada umumnya, dan penelitian pendidikan pada khususnya serta pemerintah. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dan pemerhati penelitian pendidikan.

6 Februari 2022

Penulis,

Dr. Noor Alfulaila, S. Pd, M. Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Metode Penelitian	3
BAB 2	5
KONSEP DASAR PENDIDIKAN	5
A. Pengertian Pendidikan	5
B. Konsep Dasar Pendidikan	11
C. Tujuan Pendidikan	15
D. Tujuan Pendidikan Nasional	17
E. Tujuan Pendidikan Menurut Para Ahli	18
BAB 3	21
PENDIDIKAN MULTIKULTURAL	21
A. Pengertian Pendidikan Multikultural	21
B. Komponen Pendidikan Multikultural	28
C. Program Pelaksanaan Pendidikan Multikultural	30
D. Manfaat Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar	31
E. Hasil Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar	32
F. Pandangan Islam Tentang Pendidikan Multikultural	34

BAB 4	37
MODEL DAN KARAKTERISTIK PENDIDIKAN MULTIKULTURAL	37
A. Model Pendidikan Multikultural	37
B. Karakteristik Pendidikan Multikultural	39
C. Kurikulum Pendidikan Multikultural	46
BAB 5	55
PENDIDIKAN MULTIKULTURAL SEKOLAH DASAR	55
A. Perspektif Pendidikan Multikultural	55
B. Guru dan Sensitivitas Multikultural	58
C. Mengembangkan Lingkungan Multikultural Sekolah Dasar	60
D. Pentingnya Pedagogi Kritis Sekolah Dasar	62
E. Prinsip-Prinsip Pendidikan Multikultural	63
BAB 6	67
IMPLEMENTASI NILAI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL	67
A. Pengertian Implementasi	67
B. Implementasi Pendidikan Multikultural	72
C. Kendala Dan Upaya Pendidikan Multikultural	92

BAB 7	97
STRATEGI SEKOLAH DALAM PENDIDIKAN MULTIKULTURAL	97
A. Peran sekolah dalam pendidikan Multikultural	97
B. Strategi Sekolah dalam Proses Pendidikan Berbasis Masyarakat	107
BAB 8	119
LANDASAN HISTORIS, IDEOLOGIS, DAN YURIDIS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	119
A. Landasan Historis dan Ideologis pendidikan Sekolah Dasar	119
B. Landasan Historis-Ideologis Dan Yuridis Pendidikan SD	126
BAB 9	135
KONSEP PENDIDIKAN DASAR DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN KI HAJAR DEWANTARA	135
A. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara	135
B. Impilkasi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara	157
BAB 10	163
KONSEP PENDIDIKAN BERBASIS MULTIKULTURAL ALA KI HAJA DEWANTARA	163
A. Konsep Pendidikan Multikultural	163
B. Pembelajaran Multikultural	166
C. Sistem Pendidikan dan Pengajaran	168

D. Implementasi Pendidikan Multikultural Melalui Konsep Tri Pusat Pendidikan	174
BAB 11	191
PENUTUP	191
A. Simpulan	191
DAFTAR PUSTAKA	195
BIOGRAFI PENULIS	199

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang multikultural terbesar di dunia, yang memiliki suku bangsa dengan budaya dan bahasanya yang beragam, kepercayaan, keadaan sosialekonomi, keanekaragaman agama dan serta gender (Suryana, 2015). Dengan situasi kemajemukan tersebut, maka dirasakan perlu dikembangkannya sikap toleransi bagi siswa sekolah dasar yang baru mengenal situasi keberagaman dan social yang berbeda tersebut. perilaku menghargai dapat terbentuk dan muncul di antara keberagaman sehingga dapat mewujudkan ketentraman, kenyamanan dalam tatanan kehidupan masyarakat (Farikhatin et al., 2016). Pada akhirnya tumbuhnya toleransi pada diri siswa dapat menunjang tercapainya masyarakat multikultural yang rukun dan harmonis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pendidikan multicultural di terapkan di sekolah dasar dengan mengelaborasi landasan teori dan pelaksanaan pendidikan multicultural di sekolah dasar secara utuh yang meliputi: pengertian pendidikan multikultural, komponen pendidikan multikultural, program pelaksanaan pendidikan multikultural, manfaat pendidikan multicultural di sekolah dasar, dan hasil pendidikan multikultural pada sekolah dasar.

Berdasarkan pasal 4 (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, Permendikbud (2016) maka pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik perlu mendapatkan perhatian serius. Langkah strategisnya, yakni melalui pendidikan multikultural di Sekolah. Pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk budaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara.

Pendidikan multikultural menurut Zamroni (2011) suatu bentuk reformasi pendidikan yang bertujuan untuk

memberikan kesempatan yang setara kepada siswa tanpa memandang latar belakangnya, sehingga semua siswa dapat meningkatkan kemampuan yang setara optimal sesuai dengan ketertarikan, minat dan bakat yang dimiliki. Hanum (2009) menyatakan tujuan utama pendidikan multikultural mengubah pendekatan pelajaran

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pendidikan multikultural disekolah dasar.

C. Metode Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode study literature atau metode penelitian.

Sumber data penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur yang relevan seperti buku, artikel ilmiah atau jurnal yang terkait dengan topik yang dipilih. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam metode study literature ini yaitu mendapatkan data penelitian berdasarkan hal-hal atau variabel dalam bentuk artikel, jurnal, catatan, buku dan sebagainya (Santosa, 2015).

Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis isi. Pembacaan pustaka secara berulang dan pengecekan antar pustaka dilakukan agar menjaga hasil penelitian secara tepat dan meminimalisir kesalahan dikarenakan kekurangan dari peneliti (terhindarnya dari kesalaham penyampaian informasi). Penelitian ini di laporkan dengan menyusun hasil penemuan berdasarkan prinsip kemudahan dan kesederhanaan. Hal ini mengingat peneliti memiliki keterbatasan kemampuan yang belum mampu melakukan kajian pustaka secara mendalam dan lebih detail. Selain itu, kesederhanaan dan kemudahan dalam penyampaian hasil dibuat agar mempermudah pembaca dalam memahami inti isi mengenai Pendidikan Multikultural di sekolah dasar.

BAB 2

KONSEP DASAR PENDIDIKAN

A. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik dibagian rohani atau dibagian jasmani. Ada juga para beberapa orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Dengan pendidikan kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi kita, dan juga pendidikan tersebut bisa memberantas buta huruf dan akan memberikan keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya.

Seperti yang tertera didalam UU No.20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan Negara.

Menurut UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Menurut Prof. H. Mahmud Yunus dan Martinus Jan Langeveld mengatakan pendidikan adalah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi. Agar anak tersebut memperoleh kehidupan yang bahagia dan apa yang dilakukannya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya. Selain dari itu Pendidikan adalah upaya menolong anak untuk dapat melakukan tugas

hidupnya secara mandiri dan bertanggung jawab dan pendidikan merupakan usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan.

Menurut H. Horne, pendidikan adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada tuhan, seperti termanifestasi (terwujud) dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia. Setiap negara maju tidak akan pernah terlepas dengan dunia pendidikan. Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu negara, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dapat memajukan dan mengharumkan negaranya.

Pendidikan merupakan faktor penting bagi masyarakat, demi maju mundurnya kualitas masyarakat atau bangsa sangat bergantung pada pendidikan yang ada pada rakyat bangsa tersebut. Seperti yang dikatakan oleh harahap dan poerkatja, pendidikan adalah usaha yang secara sengaja dari orang tua yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moral dari segala perbuatannya. Yang dimaksud orang tua tersebut adalah

orang tua anak itu atau orang yang mempunyai kewajiban untuk mendidik tersebut seperti guru, pendeta, dan seorang kiai. Pendidikan akan memberikan dampak positif bagi para generasi muda dan juga pendidikan akan menyiapkan generasi yang baik dan bagus bagi Negeranya. Maka dari itu para pendidik harus membutuhkan keuletan dan kesabaran didalam mengajarnya.

Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan Nasional Indonesia mengatakan pendidikan tersebut adalah merupakan tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan.

Menurut Heidjrachman dan Husnah (1997:77) pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk di dalam peningkatan penguasaan teori dan keterampilan, memutuskan dan mencari solusi atas persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan di dalam mencapai tujuannya, baik itu persoalan dalam dunia pendidikan ataupun kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Notoadmodjo

(2003:77), kalau pendidikan formal dalam suatu organisasi merupakan suatu proses pengembangan kemampuan kearah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan.

Para masyarakat mengartikan pendidikan adalah pengajaran yang di lakukan disekolah yang mana sekolah tersebut sebagai tempat terjadinya pengajaran atau pendidikan formal. Jadi pendidikan tidak seluruhnya terjadi disekolah tetapi pendidikan bisa jadi di rumah yang mana orang tua yang menjadi gurunya karena pendidikan itu akan membawa kita tidak ketinggalan jaman tetapi kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi kita.

Pengertian mengenai pendidikan tersebut, dapat dilihat dari sisi beberapa titik sudut pandang yang berbeda-beda antara dari titik sudut psikologis maupun titik sudut pandang sosiologis. Terdapat banyak pengertian maupun definisi yang membahas mengenai pendidikan, tergantung dalam melihat pendidikan melalui titik sudut manapun. Akan tetapi dalam inti sari mengenai pemaknaan konsep pendidikan mengarah pada satu tujuan yaitu suatu upaya yang dijadikan proses dalam

membina diri seseorang maupun masyarakat secara umum supaya dapat menjembatani langkah-langkah dalam menjalani kehidupan sehingga bisa meraih hidup yang diimpikan oleh semua orang yaitu menikmati kehidupan yang serba dilandasi pengetahuan dan hidup sejahtera, semua kebutuhan terpenuhinya dengan munculnya ide kreatif dan inovatif yang hanya bisa didapat dengan proses mengenyam pendidikan.

Pendidikan merupakan modal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Dalam pendidikan di Indonesia kita dapat memperoleh banyak pengetahuan seperti pengetahuan tentang moral, agama, kedisiplinan dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam pendidikan Indonesia pengembangan pikiran sebagian besar dilakukan di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi melalui bidang studi yang dipelajari dengan cara pemecahan soal-soal, pemecahan berbagai masalah, menganalisis sesuatu serta menyimpulkannya.

B. Konsep Dasar Pendidikan

Pendidikan bagi manusia menjadi penting sebagai upaya untuk melakukan proses yang terencana dan berkesinambungan sebagai dasar untuk mengembangkan potensi dan hakikat kemanusiaanya. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan siswa atau peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan bukan hanya berlangsung di sekolah. Pendidikan akan dimulai setelah anak lahir dan akan berlangsung sampai manusia meninggal dunia, sepanjang hidup ia akan mampu menerima pengaruh-pengaruh yang positif. Oleh karena itu, proses pendidikan akan berlangsung dalam keluarga, sekolah dan masyarakat.

Manusia hidup di dalam lingkungan tertentu, di dalam lingkungannya lah setiap orang memperoleh berbagai pengalaman yang turut berpengaruh terhadap perkembangan pribadinya. Dalam arti luas, semua pengalaman hidup yang berpengaruh positif terhadap perkembangan pribadi seseorang adalah pendidikan. Sebab itu, lingkungan dimana seseorang hidup merupakan

lingkungan pendidikan baginya. Terdapat tiga jenis lingkungan pendidikan (Tri Pusat Pendidikan) yaitu:

1. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi proses perkembangan seorang individu sekaligus merupakan pelatak dasar kepribadian anak. Pendidikan anak diperoleh terutama melalui interaksi antara orang tua-anak. Dalam berinteraksi dengan anaknya, orang tua akan menunjukkan sikap dan perlakuan tertentu sebagai perwujudan pendidikan terhadap anaknya.

Berbagai faktor yang ada dan terjadi di dalam keluarga akan turut menentukan kualitas hasil pendidikan anak. Jenis keluarga, gaya kepemimpinan orang tua, kedudukan anak dalam urutan keanggotaan keluarga, fasilitas yang ada dalam keluarga, hubungan keluarga dengan dunia luar, status social ekonomi orang tua, dan sebagainya akan mempengaruhi situasi pendidikan dalam keluarga, yang pada akhirnya akan turut pula mempengaruhi pribadi anak.

2. Sekolah

Pendidikan disekolah merupakan kelanjutan dalam keluarga, sekolah merupakan lembaga tempat dimana terjadi proses sosialisasi yang kedua setelah keluarga, sehingga mempengaruhi pribadi anak dan perkembangan sosialnya. Sekolah diselenggarakan secara formal. Di sekolah anak akan belajar apa yang ada di dalam kehidupan, dengan kata lain sekolah harus mencerminkan kehidupan sekelilingnya.

Oleh karena itu, sekolah tidak boleh dipisahkan dari kehidupan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan budayanya. Dalam kehidupan modern seperti saat ini, sekolah merupakan suatu keharusan, karena tuntutan-tuntutan yang diperlukan bagi perkembangan anak sudah tidak memungkinkan akan dapat dilayani oleh keluarga. Materi yang diberikan di sekolah berhubungan langsung dengan pengembangan pribadi anak, berisikan nilai moral dan agama, berhubungan langsung dengan pengembangan sains dan teknologi, serta pengembangan kecakapan-kecakapan tertentu yang langsung dapat dirasakan dalam pengisian tenaga kerja.

3. Masyarakat

Pendidikan di masyarakat merupakan bentuk pendidikan yang diselenggarakan di luar keluarga dan sekolah. Bentuk pendidikan ini menekankan pada pemerolehan pengetahuan dan keterampilan khusus serta praktis yang secara langsung bermanfaat dalam kehidupan dimasyarakat. Phillip H.Coombs (Uyoh Sadulloh, 1994:65) mengemukakan beberapa bentuk pendidikan dimasyarakat, antara lain: (1) program persamaan bagi merela yang tidak pernah bersekolah atau putus sekolah; (2) program pemberantasan buta huruf; (3) penitipan bayi dan penitipan anak pra sekolah; (4) kelompok pemuda tani; (5) perkumpulan olahraga dan rekreasi; dan (6) kursus-kursu keterampilan.

Pada masyarakat tradisional pendidikan cukup dilaksanakan di lingkungan keluarga dan masyarakat saja. Akan tetapi, dalam masyarakat modern, keluarga tidak dapat lagi memenuhi semua kbutuhan dan aspirasi pendidikan bagi anak-anaknya, baik menyangkut pengetahuan, sikap, maupun keterampilan untuk melaksanakan peranannya di dalam masyarakat. Dengan demikian, sekolah dan

masyarakat berfungsi untuk melengkapi pendidikan yang tidak dapat diberikan oleh keluarga. Namun demikian, tidak berarti bahwa keluarga dapat melepaskan tanggung jawab pendidikan bagi anak-anaknya. Keluarga diharapkan bekerja sama dan mendukung kegiatan pendidikan di sekolah dan di masyarakat.

C. Tujuan Pendidikan

Pendidikan sebagai sebuah usaha sadar tentunya memerlukan tujuan yang dirumuskan. Karena tanpa tujuan, maka pelaksanaan pendidikan akan kehilangan arah. Tujuan pendidikan dijadikan sebagai sebuah pedoman bagaimanakah proses pendidikan seharusnya dilaksanakan, dan hasil apa yang diharapkan dalam proses pendidikan.

Tujuan merupakan standar usaha yang dapat ditentukan, serta mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Di samping itu, tujuan dapat membatasi ruang gerak usaha agar kegiatan dapat terfokus pada apa yang

diimpikan, dan yang terpenting adalah dapat memberi penilaian atau evaluasi terhadap usaha-usaha pendidikan. Tujuan pendidikan adalah hal pertama dan terpenting dalam merancang, membuat program, serta mengevaluasi pendidikan.

Berdasarkan TAP.MPR No. II/MPR/1993, tentang GBHN dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertinggi semangat kebangsaan agar tumbuh manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa.

Adapun tujuan pendidikan terbagi atas empat yaitu:

- a. Tujuan umum pendidikan nasional yaitu untuk membentuk manusia pancasila
- b. Tujuan institusional yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya
- c. Tujuan kurikuler yaitu tujuan bidang studi atau mata pelajaran

- d. Tujuan instruksional yaitu tujuan materi kurikulum yang berupa bidang studi terdiri dari pokok bahasan dan sub pokok bahasan, terdiri atas tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.

D. Tujuan Pendidikan Nasional

Di dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah menumbuh-kembangkan pribadi-pribadi yang:

- 1) beriman dan bertakwaterhadap Tuhan Yang Maha Esa,
- 2) berakhlak mulia,
- 3) memiliki pengetahuan dan keterampilan,
- 4) memiliki kesehatan jasmani dan rohani,
- 5) memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, serta
- 6) memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Tujuan tersebut mempunyai implikasi imperatif atau mengharuskan semua tingkat pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. (UUD No.20 thn 2003)

E. Tujuan Pendidikan Menurut Para Ahli

Pembangunan sumber daya manusia berarti perlunya peningkatan pengetahuan, keterampilan dari kemampuan semua orang dalam suatu masyarakat. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Melalui pendidikan selain dapat diberikan bekal berbagai pengetahuan, kemampuan dan sikap juga dapat dikembangkan berbagai kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan. (Herbison dan Myers (Panpan Achmad Fadjri, 2000).

Tujuan penyelenggaraan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) adalah menyiapkan siswa agar menjadi manusia yang bermoral, menjadi warga negara yang mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dan menjadi orang dewasa yang mampu memperoleh

pekerjaan. Dan, secara operasional, tujuan pokok pendidikan dasar adalah membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan intelektual dan mentalnya, proses perkembangan sebagai individu yang mandiri, proses perkembangan sebagai makhluk sosial, belajar hidup menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan, dan meningkatkan kreativitas (Ali, 2009).

Tujuan pendidikan sekolah dasar sebagai berikut: 1) Menuntun pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, bakat dan minat siswa. 2) Meberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar yang bermanfaat bagi siswa. 3) Membentuk warga negara yang baik 4) Melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan di SLTP 5) Memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar bekerja di masyarakat. 6) Terampil untuk hidup di masyarakat dan dapat mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup. (Suharjo; 2006)

Tujuan Pendidikan merupakan gambaran kondisi akhir atau nilai-nilai yang ingin dicapai dari suatu proses pendidikan, tujuan pemahaman pendidikan SD ini amat sanagt penting karena akan memebri kemudahan kepada kita untuk memahami aspek-aspek lainnya dari

pendidikan SD sebagai suatu konsep atau sistem, dan memberi arah yang semakin jelas tentang peningkatan kinerja profesional.

BAB 3

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

A. Pengertian Pendidikan Multikultural

Keberagaman masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman suku, budaya, adat istiadat dan perbedaan agama, ras, kebudayaan dan lain sebagainya menjadikan masyarakat Indonesia yang multikultural. Hal ini dapat di jadikan tantangan dalam mempersatukan Indonesia menjadi masyarakat yang kuat dalam perbedaan dan keberagamannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengajarkan pendidikan multikultural sedini mungkin yang ditanamkan kepada siswa dalam pembelajaran. Seorang guru bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan terhadap siswanya dalam melihat perbedaan yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Pengertian kebudayaan menurut para ahli sangat beragam, namun dalam konteks ini kebudayaan dilihat

dalam perspektif fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks perspektif kebudayaan tersebut, maka multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya.

Multikulturalisme mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Multikulturalisme memandang sebuah masyarakat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik tersebut.

Istilah “multibudaya” (*multiculture*) jika ditelaah asal-usulnya mulai dikenal sejak tahun 1960-an, setelah adanya gerakan hak-hak sipil sebagai koreksi terhadap kebijakan asimilasi kelompok minoritas terhadap *melting pot* yang sudah berjalan lama tentang kultur dominan Amerika khususnya di New York dan California. Will Kymlicka berpendapat, multibudaya merupakan suatu pengakuan,

penghargaan dan keadilan terhadap etnik minoritas baik yang menyangkut hak-hak universal yang melekat pada hak-hak individu maupun komunitasnya yang bersifat kolektif dalam mengekspresikan kebudayaannya.

Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, hak asasi manusia, hak budaya komunitas, dan konsep-konsep lainnya yang relevan.

Sebagai sarana alternatif pemecahan konflik penting adanya pendidikan multikultural di Indonesia. Pendidikan multikultural memiliki peran yang penting untuk meminimalisasi dan mencegah terjadinya konflik. Dengan melalui pendidikan multikultural peserta didik diharapkan tidak meninggalkan akar budaya bangsanyanya, dan pendidikan multikultural sangat relevan digunakan untuk negara yang demokrasi pada masa sekarang ini. Dengan demikian walau menghadapi arus globalisasi para peserta didik itu tidak akan terbawa

pengaruh yang negatif dari segi kepribadian bangsa. Pada akhirnya pendidikan multikultural ini dapat mengantarkan masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang multikultural, yang mampu hidup secara rukun dan harmonis diantara beragam perbedaan yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut perlu didukung oleh adanya penerapan konsep demokrasi, keadilan dan hukum, penghargaan terhadap HAM, berdasarkan nilai-nilai idelologi bangsa.

Shaw berpendapat bahwa pendidikan multicultural adalah pendidikan yang bertujuan untuk menjembatani perbedaan rasial dan menghilangkan ketidaksetaraan antara berbagai kelompok sosial masyarakat (Shen, 2019). Membentuk sikap sosial siswa melalui kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan keberagaman dalam pergaulan tanpa memandang perbedaan budaya, ras, kondisi jasmaniah, jenis kelamin maupun status sosial masing-masing siswa (Pratiwi, Masfuah, & Rondli, 2018).

Mahiri mengatakan pendidikan multikultural merupakan pemahaman tentang isu-isu seputar siswa imigran dan cara yang lebih baik untuk melayani kebutuhan belajar dan sosial mereka (Mahiri, 2017).

Berdasarkan pendapat pendidikan Multikultural adalah pembelajaran yang mengajarkan pesertadidik tentang makna dan sikap dari setiap keberagaman.

Sebagaimana dikutip oleh Chairul Mahfud meminjam pendapat Andersen dan Cusher (1994: 320), bahwa pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Kemudian, James Banks (1993: 3) mendefinisikan Pendidikan Multikultural sebagai pendidikan untuk *People of Color*. Artinya, pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (anugerah tuhan/*sunnatullah*). Kemudian bagaimana kita mampu menyikapi perbedaan tersebut dengan penuh toleran dan semangat egaliter.

Sejalan dengan pemikiran di atas, Muhaemin el Ma'hady berpendapat bahwa secara sederhana pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu bahkan dunia secara keseluruhan (*global*).

Pendidikan multikultural memandang manusia sebagai makhluk makro yang tidak akan terlepas dari akar budaya dan kelompok etnisnya. Secara generik, pendidikan multikultural memang sebuah konsep yang dibuat dengan konsep untuk menciptakan persamaan peluang bagi semua siswa yang berbeda ras, etnis, kelas sosial dan kelompok budaya.

Pada dasarnya, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan. Pembelajaran berbasis multikultural di era globalisasi ini merupakan dasar pokok yang harus dimiliki oleh para pendidik, karena dalam pembelajaran ini pendidik harus merubah cara pandang mereka terhadap obyek pembelajaran (anak didik) tidak hanya dianggap sebagai individu tetapi harus ditempatkan sebagai warga lokal dan global.

Istilah pendidikan multikultural dapat digunakan, baik pada tingkat diskriptif dan normatif yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh juga mencakup tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural.

Dalam konteks diskriptif, maka pendidikan multikultural seyogyanya berisikan tentang tema-tema mengenai toleransi, perbedaan *ethno-cultural* dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, hak asasi manusia, demokratisasi, pluralitas, kemanusiaan universal, dan subjek-subjek lain yang relevan. Pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara menyeluruh membongkar kekurangan, kegagalan, dan praktik-praktik diskriminasi dalam proses pendidikan. Pendidikan multikultural juga dapat didefinisikan sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultur lingkungan masyarakat tertentu bahkan dunia secara eseluruhan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Paulo Freire, Pendidikan bukan merupakan menara gading yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikan menurutnya, harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya.

Pendidikan multikultural adalah untuk membantu semua siswa agar memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperoleh dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi pluralistik, serta diperlukan untuk berinteraksi, negoisasi dan komunikasi dengan warga kelompok lain agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama.

B. Komponen Pendidikan Multikultural

Menerapkan pendidikan multikultural dengan tingkat keberhasilan, semua variable sekolah saling terkait dan memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing karna sekolah sebagai sistem sosial. Pemikiran sekolah sebagai sistem sosial menunjukkan bahwa kita harus merumuskan dan memulai strategi perubahan yang mereformasi total lingkungan sekolah untuk menerapkan pendidikan multikultural (Jun, 2016).

Sejauh mana guru menggunakan contoh dan konten dari berbagai kultur dan kelompok untuk menggambarkan konsep, prinsip, generalisasi, dan teori utama dalam bidang subjek atau disiplin mereka hal ini disebut sebagai

integrasi konten. Ada juga peluang untuk mengintegrasikan konten multikultural ke dalam matematika dan sains. Namun, peluangnya tidak sebanyak yang ada dalam studi sosial (Ambarudin, 2016), seni bahasa, dan musik.

Proses konstruksi pengetahuan berkaitan dengan sejauh mana guru memiliki tanggung jawab utama. Dan dalam penelitian ini juga terlihat bahwa pendidikan guru dan sikap positif guru terhadap pendidikan multikultural memiliki peran penting untuk hidup dalam rasa toleransi menjadi damai dan penuh rasa saling menghormati untuk menerima semua identitas dengan kekayaan budaya mereka tanpa takut akan pemisahan (Yılmaz, 2016). Pengurangan prasangka menggambarkan pelajaran dan kegiatan yang digunakan guru untuk membantu siswa mengembangkan sikap positif terhadap berbagai kelompok ras, etnis, dan budaya.

Pedagogi Ekuitas Guru dalam setiap disiplin ilmu dapat menentukan sejauh mana mereka mencerminkan masalah dan kekhawatiran multikultura dan menganalisis prosedur dan gaya pengajaran mereka. Struktur Sosial yang memberdayakan dimensi penting lain dari

pendidikan multikultural serta budaya sekolah terkait organisasi sekolah yang mempromosikan kesetaraan gender, ras, dan kelas sosial.

C. Program Pelaksanaan Pendidikan Multikultural

Penelitian yang dilakukan oleh retnasari mengemukakan hasil dari perogram pelaksanaan pendidikan multikultural dengan membangun pemahaman keberagaman pada lingkungan sekolah melalui paradigma keberagaman inklusi, mata pelajaran PPKn berbasis multikultur yang tersusun dalam program intrakulikuler, program kokurikuler, dan kedisiplinan seorang pengajar (Latifah, 2018) hal ini menunjukkan bahwa program pelaksanaan pendidikan multicultural di lakukan dengan mengintegrasikan mata pelajaran di dalamnya.

Pada pelaksanaan kegiatan mengajarkan pendidikan multikultural juga harus diajarkan di ruang kelas, sekolah, dan agar membangun kesadaran kritis siswa dan guru tentang apa yang terjadi saat ini (Au, 2017). Hal ini dapan menumbuhkan nilai-nilai positif kepada peserta didik. Guru dan Siswa memiliki peran (Kirom, 2017) sebagai

demonstrator, pengelola kelas, mediator dan evaluator sedangkan siswa sebagai subject dalam pendidikan multicultural. Guru yang sudah memiliki pengalaman dalam perogram pengembanagan dalam pengajaran pendidikan multikultural akan lebih berhasil dalam mengajar pendidikan multikultural (Jun, 2016).

D. Manfaat Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar

Terdapat beberapa manfaat dari pendidikan multicultural diantaranya yaitu mencegah sikap radikalisme di era globalisasi (Latifah, 2018). Tujuan utama pendidikan multikultural dapat menjadikan generasi muda sebagai agen peredam konflik antar golongan (SARA) yang biasa melibatkan gerakan radikalisme yang kerap terjadi di Indonesia.

Mampu menjadi teladan yang mampu menerima perbedaan dengan penuh toleransi menjadikan tugas guru sebagai pendidik, hal tersebut harus diimbangi dengan pemahaman konsep multikultur secara komperhensif. Karena sudah dibekali sikap untuk saling toleran, menghormati, tulus terhadap keanekaragaman yang ada di

masyarakat Indonesia. Sehingga, perbedaan suku, adat, ras, dan agama tidak menjadi celah untuk gerakan radikalisme.

Pendidikan multikultural dapat terintegrasi dengan mata pelajaran agama seperti pendidikan islam multicultural dapat menjadikan pemahaman keislaman dalam masyarakat muslim yang berubah terhadap perbedaan. Adapun sikap yang perlu dirubah atau di perbaiki adalah yang ada perlu diubah menjadi universalisme, dengan harapan dapat melahirkan generasi yang siap hidup dalam toleran (tasamuh) dan wacana multikulturalisme sehingga tidak adanya sikap eksklusivis yang dapat menjadikan peserta didik yang ekstrim terhadap pemahaman yang kurang mampu memiliki rasa toleransi serta perbedaan antar peserta didik yang lain (Akbarjono, 2018).

E. Hasil Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar

Berdasarkan Danel dalam penelitian pendidikan multicultural sekolah dasar di wilayah 3T menunjukkan hasil bahwa pendidikan multicultural dapat terbentuk dengan cara pembiasaan untuk tidak berperilaku dan

berfikir membeda-bedakan, dengan memahami dan menghargai persepsi orang lain, menumbuhkan kesetaraan serta rasa kesamaan serta keadilan social. Sedangkan penelitian Lisa (Retnasari & Hidayat, 2018) strategi pendekatan aditif dengan peran serta pendidik pada proses pengintegrasian nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran di sekolah dasar dapat dilakukan dengan pelaksanaannya pendidikan multikultural.

Di perlukan beberapa aspek dalam mengajarkan pendidikan multikultural yaitu membiasakan pesertadidik untuk tidak memperlakukan orang lain secara diskriminasi dan membedakan, serta memahami dan menghargai pendapat oranglain, layanan pendidikan adalah ruang dinamis di mana sekolah menjadi tempat untuk bertukar pikiran, pendapat, dengan menghindari penyimpangan yaitu rasisme atau menjadikan satu pemahaman yang tidak dapat dijadikan sebagai rasa toleransi. Menumbuhkan rasa simpati dan empati dengan membangun kultur respect for others sesuai budaya masyarakat tiap-tiap daerah. Serta dapat menumbuhkan rasa kesetaraan dan keadilan sosial, yakni memberikan

akses dan kesempatan yang sama kepada semua budaya, etnis dan agama di sekolah.

F. Pandangan Islam Tentang Pendidikan Multikultural

Sebagaimana yang dikutip oleh Sukron Kamil, yang menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam tetapi di lain pihak mengakui adanya perbedaan di antara kalangan Islam. Menurut Nurcholis, dalam bahasa budaya, demokrasi bukanlah kata benda tetapi lebih merupakan kata kerja, sebagai proses demokratisasi. Demokrasi adalah suatu kategori dinamis. Ia senantiasa bergerak atau berubah, kadang negatif (mundur), kadang positif (berkembang maju).

Dari nilai-nilai pendidikan multikultural tentang penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Islam berprinsip egalitarianisme (persamaan) atau dipertahankannya penghormatan pada hak-hak non muslim dan segi hak-hak perempuan.

Sebagaimana dikutip oleh Idris Thaha meminjam pendapat Amien Rais, kita tidak hanya memerlukan tauhid-akidah, tetapi juga tauhid sosial. Tauhid sosial

secara sederhana dapat diartikan dengan penegakan keadaan sosial di dalam masyarakat. Manusia tauhid dan umat tauhid memikul kewajiban untuk menegakkan suatu orde sosial yang adil dan etis. Banyak ayat al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk mengutuk ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan, dan menyuruh manusia untuk menegakkan suatu tatanan sosial yang etis dan egalitarian.

Dalam kajian Islam sebagai suatu perangkat ajaran dan nilai, tentunya kita semua setuju, bahwa memang Islam telah meletakkan konsep dan doktrin yang memberikan rahmat bagi al-alam. Islam sebagai ajaran yang memuat nilai-nilai normatif, begitu bagus dalam memandang dan menempatkan martabat dan harkat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota sosial.

Pada awal memulai kehidupan di Madinah, langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah menyatukan masyarakat di madinah dan sekitarnya yang terdiri dari beberapa suku dan agama. langkah strategis ini yang melahirkan "Piagam Madinah" yang meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat majemuk. Dalam Piagam

Madinah tersebut diatur hubungan antara sesama anggota komunitas Islam, dan antara anggota komunitas Islam dengan komunitas lainnya.

Pendidikan multikultural memegang peranan dan posisi yang strategis dalam rangka mensukseskan pencapaian tujuan yang bernuansa pada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu pendidikan multikultural berupaya untuk mensosialisasikan, menanamkan dan menghargai nilai-nilai kemajemukan. Setiap siswa ditanamkan untuk menerima keragaman dalam kehidupan yang harmonis dan saling menolong. Begitu juga dengan Islam yang mengenal istilah persamaan derajat dan martabat manusia pada umumnya. Sejak semula, salah satu prinsip dalam Islam adalah menjunjung tinggi martabat manusia, dan menempatkannya dalam status supremasi di antara makhluk Tuhan lainnya.

BAB 4

MODEL DAN KARAKTERISTIK PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

A. Model Pendidikan Multikultural

Pendidikan berperan sebagai proses individuasi, yaitu adanya perpaduan yang menyeluruh antara individu dengan lingkungan (kehidupan masyarakat) dan kebudayaan seperti yang dikemukakan oleh Berger dan Luckman.

Untuk menganalisis internalisasi nilai budaya, perlu dipertimbangkan mekanisme sosial yang nyata ada saat perubahan itu berlangsung. Oleh karenanya, menurut Sulalah tidak perlu disangsikan lagi bahwa pendidikan karakter adalah upaya dengan melibatkan semua pihak pada setiap struktur. Pendidikan karakter tidak akan optimal jika tidak adanya keseimbangan dan keharmonisan antar lingkungan.

Berkaitan dengan menumbuhkan nilai nilai kebaikan, Lincona menawarkan tiga komponen karakter yang baik

yaitu; *pertama, moral knowing* (pengetahuan tentang moral), *kedua, moral feeling* (perasaan tentang moral). *Ketiga, moral action* (perbuatan moral). Ketiga komponen moral di atas meliputi dimensi sebagai berikut:

- 1) Moral knowing meliputi 6 dimensi;
 - a) *Awareness* (kesadaran tentang baik dan buruk)
 - b) *Knowing values* (pengetahuan tentang nilai)
 - c) *Perspective-taking* (menggunakan pandangan moral)
 - d) *Reasoning* (Pertimbangan Moral)
 - e) *Desition making* (membuat keputusan berdasarkan moral)
 - f) *Self-knowladge* (pengetahuan tentang diri)

- 2) Moral feeling meliputi 6 dimensi:
 - a) *Conscience* (nurani)
 - b) *Self-esteem* (percaya diri)
 - c) *mpaty* (merasakan penderitaan orang lain)
 - d) *Loving the good* (mencintai kebenaran)
 - e) *Self control* (pengendalian diri)
 - f) *Humality* (kerendahan hati)

3) Moral action meliputi 3 dimensi:

- a) *Competence* (kompeten dalam menjalankan moral)
- b) *Will* (kemauan untuk berbuat baik)
- c) *Habit* (kebiasaan untuk berbuat baik)

Dari beberapa indikator di atas, pembangunan karakter mampu mengantarkan setiap individu untuk peka terhadap keadaan sosial bila terjadi integrasi dari ketiga komponen moral tersebut.

B. Karakteristik Pendidikan Multikultural

Iklim dan budaya pendidikan multikultural tentu berbeda dengan pendidikan yang khusus. Pendidikan yang hanya mengambil satu sasaran agama, sosial, atau budaya tertentu. Sejalan dengan konsepnya pendidikan multikultural yang memiliki karakteristik berprinsip pada demokrasi, kesetaraan dan keadilan, berorientasi pada kemanusiaan, kebersamaan dan kedamaian dan mengembangkan sikap mengakui, menerima dan menghargai. Dari karakteristik di atas dapat dijabarkan sebagai berikut ini:

1. Berprinsip pada Demokrasi, Kesetaraan dan Keadilan
Negara Amerika, Kanada, dan Jerman tidak membolehkan anak-anak dari keluarga kulit hitam dan imigran untuk sekolah, sedangkan di negara Afrika, Banglades, Brazil, China, Mesir, India, Indonesia, Mexico, Nigeria, dan Pakistan terbatasnya untuk sekolah. Ini bertentangan dengan nilai demokrasi, kesetaraan dan keadilan sebagai prinsip pendidikan multikultural.

Setiap manusia mengakui kesetaraan antara manusia satu dengan yang lain. Pengakuan kesetaraan derajat, kesetaraan hak dan kesetaraan kewajiban sesama manusia. Kesetaraan penting dalam kondisi masyarakat yang beragam. Kesetaraan kedudukan, kewajiban dan hak sama dalam kehidupan di masyarakat sekitar, berbangsa dan bernegara.

Demokrasi adalah sistem terbaik untuk menciptakan keadilan. Karena semua orang bebas berkarya tapi dibatasi oleh ideologi negara dan kepentingan umum; keterwakilan setiap kelompok untuk menjadi pemimpin; dan perselisihan politik diselesaikan secara damai dan demi kepentingan umum; peranserta rakyat menjadi lebih banyak orang memperoleh keadilan; dan inti demokrasi

adalah pemantauan rakyat, dengan begitu penguasa tidak semena-mena.

Keadilan terpenuhi sesudah terbentuk keadilan secara umum, yaitu semua orang mendapatkan haknya dan semua orang mendapatkan sama dari bagian aset yang dimiliki bersama. Ada dua macam keadilan, yaitu keadilan khusus adalah keadilan berdasarkan keselamatan. Dan keadilan umum adalah keadilan yang ada dalam undang-undang yang wajib dilaksanakan untuk umum.

2. Berorientasi kepada kemanusiaan, kebersamaan dan kedamaian

Nilai kemanusiaan seorang manusia itu secara alamiah dan sosial juga didasarkan pada kemampuannya menghargai kode etik dan sopan santun sebagai makhluk berbudaya yang tidak liar. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dihargai bukan karena bangunan tubuhnya yang indah, akan tetapi karena kualitas perbuatannya yang didasarkan pada kematangan pemikiran dan kesadaran yang membentuk sikap hidup yang bijak. Kapasitas akal manusia itulah yang menjadi ciri utama kemanusiaan dan aktualitasnya dalam kehidupan kongrit.

3. Mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai keragaman

Sikap menerima, mengakui dan menghargai keragaman penting dalam hubungan sosial di masyarakat yang beranekaragam. Dalam masyarakat beragam ada bagian masyarakat yang dominan dan minoritas. Dengan sikap menerima, mengakui dan menghargai keragaman memunculkan hubungan harmonis.

Hubungan antar kelompok berlandaskan atas saling percaya dan menghargai menjadikan terjaganya kelompok masing-masing. Dalam hubungan antara kelompok semacam ini tidak akan hilangnya identitas kelompok. Hubungan ini tidak ada kendali kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Setiap individu mampu menerima, menghormati dan membentuk kerjasama dengan kelompok yang berlainan ini dinamakan kompetensi kultural. Kemampuan berbudaya berasal dari pengetahuan dan bias kultural yang menjadikan perbedaan kultural. Proses penambahan kompetensi kultural membutuhkan penambahan pengetahuan, kreatifitas, sifat dan perbuatan yang memahamkan orang dan berhubungan secara efektif dengan orang yang

mempunyai perbedaan kultur.

Hal-hal yang merupakan karakteristik teori multikultural adalah:

1. Penolakan terhadap teori universalitas yang cenderung mendukung pihak yang kuat, sedangkan teori multikultural lebih cenderung mendukung dan berupaya memberdayakan pihak yang lemah.
2. Teori multikultural mencoba menjadi inklusif yaitu berupaya untuk menawarkan teori atas kelompok-kelompok lemah.
3. Teori multikultural tidak bebas atau tidak mengobral nilai, tetapi lebih kepada menyusun teori atas nama pihak yang lemah dan bekerja di dunia sosial untuk mengubah struktur sosial, kultur, dan prospek, untuk masing-masing individu
4. Teori multikultural tidak hanya berkecimpung dalam dunia sosial saja tetapi juga dunia intelektual, dengan cara menjadikannya lebih terbuka dan beragam.
5. Tidak ada untuk menarik garis yang jelas antara teori dan type narasi lainnya.
6. Teori multikultural sangat kritis, yaitu kritik terhadap diri dan kritik terhadap teori lain, yang paling penting

terhadap dunia sosial.

7. Teori multikultural menyadari bahwa karya mereka dibatasi oleh sejarah tertentu, konteks kultural dan sosial tertentu, yang mana mereka pernah hidup dalam konteks tersebut.

Conrad P. Kottak mengemukakan bahwa kultur memiliki karakter-karakter khusus dari tujuh segi, 1) sebagai muatan, 2) sebagai fungsi, 3) sebagai indicator, 4) sebagai tujuan, 5) sebagai aktivitas, 6) sebagai model, 7) sebagai proses.

Purwasito mengemukakan struktur kultur terbagi atas empat macam, yaitu mikrokultur (kelompok masyarakat), subkultur (kelompok lokal), makrokultur (skala nasional), dan superkultur (skala global). Sedangkan pada saat pertukaran budaya dalam waktu yang lama (proses akulturasi) akan menghasilkan versi kultur lain.

Karakteristik teori multikultural mampu memudahkan kita untuk lebih dalam mengetahui ciri-ciri, tujuan, dan bagaimana hakikat multikultural sendiri. Sehingga multikultural bisa dengan mudah difahami oleh

khalayak umum. Tentu karakteristik multikultural ini memiliki paradigma baru tentang multikultural menurut Ali Maksum dalam bukunya *Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia*.

Jika multikulturalisme memiliki karakteristik yang khas, yang mana ini sebuah faham yang hadir pada setiap insan, tentu yang memilikinya pun memiliki karakteristik pula, yang mana hal ini adalah masyarakat multikultural itu sendiri.

Adapun beberapa karakteristik multikultural menurut Pierre L. Van de Berghe adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat terbagi dalam dua bagian bentuk kelompok, yaitu kelompok latar budaya dan kelompok sub-budaya yang berbeda.
2. Masyarakat memiliki struktur sosial yang terbagi dalam lembaga yang bersifat non komplementer.
3. Masyarakat kurang adanya kesadaran dalam mengembangkan kesepakatan, sehingga sering menimbulkan konflik antarkelompok sub-budaya tersebut.

4. Konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat dihindari dan integrasi sosial akan terjadi, dengan cara memaksa dan ditambah adanya ketergantungan satu sama lain dalam bidang ekonomi.
5. Adanya dominasi politik antarkelompok.

Dari karakteristik ini dapat dikembangkan pemahaman dan makna tentang multikulturalisme, yaitu sebuah paham tentang kultur atau budaya yang beragam. Dalam keragaman kultur ini meniscayakan adanya rasa saling toleransi, pengertian antar sesama, dan sejenisnya. Agar tercipta kondisi masyarakat yang damai dan terhindar dari berbagai konflik.

C. Kurikulum Pendidikan Multikultural

1. Manifest Curriculum dan Hidden Curriculum

Kurikulum berasal dari bahasa latin “*curriculai*”, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan pada abad ke-20. Dalam konteks pendidikan kurikulum diartikan sebagai jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh

oleh peserta didik dengan tujuan untuk memperoleh ijazah. Dengan adanya ijazah, merupakan suatu bukti bahwa seorang peserta didik telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pelajaran. Ibaratnya seorang pelari telah menempuh suatu jarak antara satu tempat ke tempat lainnya yang pada akhirnya mencapai *finish*.

Salah satu pengertian yang melekat pada kurikulum adalah kurikulum sebagai verbalisasi dari idea atau gagasan yang kompleks yang tercapai oleh dunia pendidikan sebagaimana tertuang dalam dokumen kurikulum.. Definisi lain kurikulum dinyatakan sebagai satu dokumen tertulis yang memerlukan penerapan dalam bentuk proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam hal ini disebut dengan *manifest curriculum*.

Kurikulum sebagai dokumen dan konsep tidak mempunyai makna apa-apa jika tidak dilaksanakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Bahkan proses pelaksanaan atau penerapan kurikulum menjadi salah satu materi tersendiri dalam kurikulum itu, yang kita kenal sebagai kurikulum tersembunyi atau *hidden curriculum*.

John D. MC. Neil telah memberikan pengertian, *hidden curriculum* merupakan pengaruh pembelajaran yang tidak resmi (tidak direncanakan) hal mana bisa melemahkan atau menguatkan dalam merealisasikan tujuan.

Allan A. Glatton, yang menyatakan bahwa *hidden curriculum* merupakan kurikulum yang tidak menjadi bagian untuk dipelajari. Hal ini dapat digambarkan dari beberapa aspek yang ada di sekolah di luar kurikulum yang dipelajari, namun memberikan pengaruh dan perubahan nilai, perspsi, dan tingkah laku peserta didik.

H. Dakir, yang menyatakan *hidden curriculum* merupakan kurikulum yang tidak direncanakan, tidak diprogram, dan tidak dirancang, tetapi mempunyai pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap output dari proses belajar mengajar.

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa *hidden curriculum* (kurikulum tersembunyi) merupakan sebuah rancangan pendidikan yang tidak tertulis dan tidak dibakukan dalam peraturan-peraturan pembelajaran. Akan tetapi diaplikasikan dalam proses belajar- mengajar dan

memiliki pengaruh terhadap keperibadian peserta didik, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai output dari proses belajar-mengajar.

Pendidikan multikultural memiliki konsep kurikulum yang khas sesuai dengan paradigma multikulturalisme itu sendiri. Abdullah Aly memberikan deskripsi yang cukup komprehensif mengenai konsep kurikulum pendidikan multikultural ditinjau dari komponen inti kurikulum, yaitu kompetensi, materi, proses pembelajaran dan evaluasi. Keempat hal tersebut merupakan komponen inti dari kurikulum. Komponen kompetensi menekankan pembahasannya dalasan pentingnya kurikulum pendidikan multikultural, komponen materi menekankan pada materi apa saja yang akan diberikan, komponen proses pembelajaran menekankan pembahasan bagaimana menyampaikan materi kepada peserta didik, sedangkan komponen evaluasi memfokuskan pada keberhasilan kompetensi yang telah ditetapkan.

2. Materi dalam kurikulum pendidikan multikultural

Komponen inti lain dari kurikulum pendidikan multikultural adalah materi (*content*). Dalam segi materi

kurikulum dapat didefinisikan sebagai isu, tema, topik, dan konsep-konsep yang akan disampaikan oleh guru kepada peserta didik.

Kurikulum pendidikan multikultural model ini menurut Burnett, mengambil bentuk yang cukup sederhana yaitu dengan cara menambahkan isu-isu dan konsep-konsep multikultural pada kurikulum yang sudah ada. Tujuan utama dari kurikulum pendidikan multikultural model ini adalah untuk memasukkan materi tentang kelompok kultural yang beragam dalam kurikulum dan program pendidikan, agar pengetahuan peserta didik tentang beragam kelompok tersebut meningkat.

Burnett dan Banks tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang cara memilih materi pendidikan perspektif multikultural. Mereka hanya menjelaskan secara garis besar bahwa materi yang dapat diintegrasikan kedalam kurikulum multikultural adalah isu, tema, topik, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan multikulturalisme. Adapun pakar pendidikan multikultural yang menjelaskan secara detail tentang materi yang dapat diintegrasikan dalam kurikulum

multikultural adalah Donna M. Gollnick dan Philip C. Chinn, menurutnya, konsep yang dapat diberikan dalam kurikulum pendidikan multikultural adalah: rasisme, seksisme, prasangka, diskriminasi, penindasan, ketidakberdayaan, ketidakadilan kekuasaan, keadilan, dan stereotip.

3. Strategi dan metode dalam kurikulum pendidikan multikultural

Dalam segi prosesnya, strategi pembelajaran merupakan aspek penting dalam pendidikan multikultural. Harry K. Wong mendefinisikan strategi pembelajaran sebagai “praktik dan prosedur yang memungkinkan pendidik dalam mengajar dan peserta didik saat belajar”. Terkait dengan praktik dan prosedur ini, Ricardo L. Gracia menyebutkan tiga faktor dalam proses pembelajaran, yaitu: (a) lingkungan fisik, (b) lingkungan sosial, dan (c) gaya pengajaran pendidik.

Dalam pendidikan multikultural gaya pembelajaran demokratis sering digunakan. Melalui gaya ini pendidik dapat menggunakan beragam strategi pembelajaran, seperti dialog, simulasi, bermain peran, observasi, dan penanganan kasus. Melalui dialog peserta didik dapat

mendiskusikan sumbangan bermacam budaya dan orang dari suku lain dalam hidup bersama dalam satu bangsa. Melalui simulasi dan bermain peran, peserta didik diberikan fasilitas untuk memerankan diri sebagai orang yang memiliki budaya dan etnik tertentu dalam pergaulan sehari-hari, misalnya saat momen tertentu diadakan proyek dan kepanitiaan bersama dengan melibatkan para peserta didik dari berbagai etnik, budaya, agama, dan bahasa yang beragam. Sedangkan melalui observasi dan penanganan kasus, pendidik dan peserta didik diberikan fasilitas untuk tinggal beberapa hari di lingkungan masyarakat multikultural, mereka dapat mengamati proses sosial yang terjadi antara individu dan kelompok yang ada, serta melakukan mediasi jika terjadi konflik diantara mereka.

Selain strategi yang digunakan dalam kurikulum pendidikan multikultural, ketepatan dalam memilih metode pembelajaran merupakan salah satu faktor penting dalam membangkitkan motivasi dan semangat belajar peserta didik. Terdapat beragam metode yang cocok untuk kurikulum pendidikan multikultural.

Diantara metode pembelajaran yang dimaksud adalah metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi.

4. Evaluasi dalam kurikulum pendidikan multikultural

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian kompetensi diperlukan evaluasi. Jika kompetensi pendidikan multikultural diorientasikan pada penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain, baik secara kognitif, afektif, dan psikomotor, maka evaluasi di sini juga diarahkan pada dua orientasi tersebut.

Mercer, Ricardo L. Gracia mengatakan bahwa evaluasi pendidikan multikultural dapat dilakukan dengan cara menggunakan teknis studi kasus dan teknik observasi yang dimodifikasi dengan teknik bermain peran (*role-playing*). Teknik studi kasus dapat diterapkan oleh pendidik untuk menguji persepsi dan pemahaman peserta didik terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Dalam kaitan ini, pendidik mengajukan kasus tentang insiden yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Misalnya, insiden diskriminasi perlakuan yang dilakukan oleh suatu organisasi yang anggotanya beragam etnik, bahasa, budaya, dan cara pandang keagamaan. Pendidik meminta peserta didik untuk

mengajukan pendapatnya tentang insiden tersebut, termasuk perlakuan yang sebaiknya dilakukan dan perlakuan yang seharusnya dihindari dilengkapi dengan argumentasinya. Dari sini pendidik dapat menilai persepsi dan pemahaman peserta didik terhadap diri sendiri dan orang lain: baik atau buruk.

Evaluasi pendidikan multikultural dilakukan untuk menguji keberhasilan pencapaian kompetensi pendidikan multikultural. Tes prestasi yang ditawarkan digunakan untuk menguji prestasi akademik dan non-akademik dari peserta didik dengan memerhatikan tiga domain yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Teknik evaluasi pendidikan multikultural dapat berupa: teknik studi kasus pemecahan masalah, kinerja, pengamatan, dan bermain peran.

BAB 5

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL SEKOLAH DASAR

A. Perspektif Pendidikan Multikultural

Secara etimologis istilah multikultural dibentuk dari dua kata yakni multi dan kultural. Multi berarti banyak, ragam, aneka, bermacam-macam. Sedangkan kultural berarti budaya. Jadi multikultural secara sederhana dapat diartikan sebagai keragaman budaya. Pendidikan multikultural secara etimologis juga dibentuk dari dua kata yakni pendidikan dan multikultural.

Zamroni, (2003:24) mendefinisikan pendidikan dalam arti luas sebagai proses yang berkaitan dengan upaya mengembangkan diri seseorang pada tiga aspek. Konsep ini sejalan dengan gagasan Dewey, (1944:1-4) bahwa pendidikan adalah process of facilitating learning or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs and habits. Dengan demikian pendidikan multikultural secara

seederhana diartikan sebagai upaya memfasilitasi keragaman budaya peserta didik dalam berbagai aspeknya di sekolah.

Secara historis, pendidikan multikultural berkembang di Eropa, Amerika, Kanada dan negara-negara maju lainnya pada dekade 1970 sampai 1980-an, terutama di lembaga-lembaga pendidikan. Konsep ini lahir karena lembaga pendidikan dan kebijakan pemerintah memanfaatkan keanekaragaman masyarakat sebagai potensi membangun negara. Karim al-Hussaini dan Aga Khan Muslim Ismaili (Zamroni, 2014: 14) tokoh muslim dan anggota parlement Kanada mengungkapkan peran penting keberagaman bahwa: *“the most successful pluralist society on the face of our globe, citing it as a model for the world. The experience of Canadian governance its commitment to pluralism and its support for the rich multicultural diversity of its peoples is something that must be shared and would be of benefit to all societies in other parts of the world.”*

Pengalaman spiritual masyarakat Kanada menjelaskan esensi dan eksistensi pendidikan multikultural sebagai nilai (*value*), bagaimana masing-

masing kelompok atau lembaga seperti sekolah bersedia untuk menyatu (*integrate*) tanpa mengabaikan keragaman budaya yang dimiliki. Sekolah sebagai miniatur masyarakat maupun individu melebur dalam proses hibridisasi dimana setiap individu tidak menonjolkan perbedaan atau dominasi budaya tertentu.

Parsudi Suparlan, (2004) menegaskan bahwa multikulturalisme lebih merupakan sebuah ideologi, atau paham yang memberikan ruang nyaman bagi paradigma perbedaan, dan menjadi salah satu entitas mendasarkan kemanusiaan seorang manusia. Setiap warga negara Indonesia apapun budaya, agama, etnis, pandangan politik mengakui pluralisme sebagai corak hidup (*the way of life*). Implikasinya adalah pendidikan dipandang sebagai rangkaian keyakinan (*set of belief*). Artinya, pendidikan memfasilitasi keragaman budaya, etnis, gaya hidup, perbedaan latar sosial setiap individu maupun kelompok untuk memperoleh akses yang sama dan adil.

Pendidikan multikultural sebagai *way of life* berfungsi untuk membentuk perilaku manusia menuju sebuah pluralisme konstruktif yang telah disepakati oleh UNESCO tahun 1999 di Paris (Eddy Kristiyanto dan William Chang,

2014:xi). Pendidikan multikultural menjadi relevan untuk menggali kekayaan budaya kabupaten Sintang yang kaya. Kekayaan Sintang tidak hanya dari sisi alam, hutan yang luas, sungai besar dan indah tetapi juga sejarah Sintang yang unik dengan ragam dinamika etnisitas, seni, sastra, tenun ikat, seni lukis, tarian dalam kesatuan kultural dan religius yang khas. Rekomendasi UNESCO jelas menginginkan sebuah pluralisme konstruktif untuk membangun masyarakat dengan nilai-nilai keadaban historik yang agung.

B. Guru dan Sensitivitas Multikultural

Belum banyak gagasan pendidikan multikultural masuk dalam konsep pendidikan sekolah dasar Indonesia. Namun demikian, penting bahwa gagasan ini memberi konsep baru kepada kepala sekolah, guru, orangtua, dan komite sekolah yayasan, dan pemerintah daerah. Menurut Banks, (2007:82), “multicultural education is also an educational reform movement that tries to reform schools in ways that will give all students an equal opportunity to learn. It describes teaching strategies that empower all students and give them voice.” Pendidikan multikultural

sebagai gerakan perubahan reformasi sekolah dimana semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan mendapatkan hak-haknya secara adil.

Salgur dan Gursoi (2015: 15) dalam risetnya tentang *“Multicultural Education and Teacher’s Characteristic”* menyimpulkan bahwa sensitivitas multicultural sangat penting sebagai penentu keberhasilan siswa dalam proses belajar di kelas. Ia berkeyakinan bahwa:

“Nowadays, the societies that have a homogeneous structure are increasingly rare. The more and more numerous multicultural environments bring about positive and negative results. Moreover, every culture’s multicultural structure is changing day by day. For example, due to various reasons, nowadays, living in a foreign country as a stranger and living together with foreigners is something that occurs quite frequently.”

Sekolah dasar bisa menjadi instrumen terjadinya perubahan sosial melalui reformasi kurikulum. Reformasi kurikulum dapat tercermin dalam pengembangan model pembelajaran multikultural sekolah dasar. Riset dari Farida Hanum dan Setya Rahardja (2006) tentang pengembangan model pembelajaran pendidikan

multikultural menunjukkan bahwa modul pendidikan multikultural efektif diterapkan di kelas empat sekolah dasar. Modul pendidikan multikultural yang mengambil subyek eksperimen guru, siswa, orangtua dan komite sekolah dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan pendidikan multikultural sekolah dasar. Ketika guru memiliki pemahaman dan sensitivitas multikultural yang baik maka kepekaan tersebut termanifestasi dalam inovasi pembelajaran melalui eksperimen menerapkan modul pendidikan multikultural yang telah terbukti efektif.

C. Mengembangkan Lingkungan Multikultural Sekolah Dasar

Kultur sekolah yang baik menurut Zamroni, (2011:111) harus bersifat terbuka, demokratis dan menghormati kerja keras, kejujuran, solidaritas dan kesetiakawanan sosial. Tujuannya adalah memperkuat persaudaraan, memberi ruang kebebasan bagi setiap siswa untuk mengekspresikan diri. Keberhasilan pendidikan multikultural tidak hanya terjadi pada aspek kurikulum saja tetapi pada lingkungan dan actor

pendidikan. Pendidikan multikultural menjadi tidak efektif pada lingkungan sekolah yang tidak ramah dan guru dengan sikap negatif terhadap siswa. Guru perlu memahami bahwa individu siswa memiliki kelompok yang beragam dan ditentukan oleh banyak aspek seperti gender, kelas sosial, etnis, ras, agama, kondisi fisik, kecacatan dan kebangsaannya.

Semua aspek tersebut dalam konsep Banks (2005:14 & Gorsky, 2008) berpengaruh kuat terhadap individu siswa. Pendidikan multikultural di sekolah harus memperkuat hubungan interaksi verbal (dialog) antara guru dan siswa terutama terhadap siswa dari tingkat ekonomi, etnis dan agama minoritas. Norma-norma kelembagaan direkonstruksi agar memenuhi rasa keadilan. Adanya pemerataan kesempatan bagi guru dan siswa untuk berkembang. Lingkungan sekolah sebagai sistem sosial harus demokratis dan menggerakkan semua komponen agar berjalan baik dan produktif.

D. Pentingnya Pedagogi Kritis Sekolah Dasar

Di sekolah-sekolah dasar kebanyakan, siswa lebih banyak diajari tentang bagaimana berpikir dari pada mengenai apa yang dipikirkan. Siswa semestinya dilatih dan dibiasakan memahami semua jenis pengetahuan, aktif mengkonstruksi pengetahuannya (*knowledge construction*) dan membiasakan interpretasi yang berbeda-beda dari setiap siswa. Siswa perlu ditanamkan pengetahuan dan kesadaran akan adanya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Siswa harus belajar bahwa semua pengetahuan yang mereka peroleh terdapat interpretasi yang beraneka ragam.

Menuju pendidikan multikultural sekolah dasar, Marri (2005:107) menjelaskan bahwa sekolah harus dikembangkan dengan kerangka *Classroom Based Multicultural Democratic Education* (CMDE) dengan tiga unsur utama yaitu (1) *building of community* (2) *thorough disciplinary content* (3) *critical pedagogy*. Konsep membangun komunitas adalah mengupayakan kelas yang kolaboratif dan saling menghargai perbedaan. Siswa belajar saling menghargai satu sama lain melalui diskusi, kerja kelompok, pemecahan masalah sehingga dibangun

pemahaman, nilai dan sikap hidup demokratis. Mengenai konten mata pelajaran yang cermat, muatannya meliputi pengetahuan akdemis pokok dan pengetahuan akademis transformatif, emansipatoris (Zamroni, 2002:77 dan Palmer, 2010:215).

Pada aspek konten siswa wajib dibekali pengetahuan dan keterampilan sehingga siswa dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam masyarakat. Sedangkan pendidikan kritis tekananya pada penggunaan pengetahuan akademik transformatif agar membuat siswa sadar akan kondisi sosial politik dalam masyarakat sehingga ia mampu menjadi agen perubahan (*agent of change*) dalam masyarakat.

E. Prinsip-Prinsip Pendidikan Multikultural

Sebuah pendidikan multikultural diperlukan sebuah prinsip yang dijadikan sebuah landasan untuk bergerak, karena menginggat pentingnya akan nuansa pendidikan multikultural untuk menjawab persoalan-persoalan dewasa ini, oleh karena itu peneliti mengkaji prinsip-

prinsip pendidikan multikultural dari berbagai sumber yang dibutuhkan seperti dibawah sebagai berikut ini.

Pertama, pendidikan multikultural didasarkan kepada pada pedagogik kesetaraan manusia (*equity pedagogy*). *Kedua*, pendidikan multikultural ditunjukan kepada terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan mengembangkan pribadi-pribadi indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. *Ketiga*, prinsip globalisasi tidak perlu ditakuti apabila bangsa ini mengetahui arah serta nilai-nilai baik dan buruk yang dibawahnya.

Bentuk pendidikan multikultural ini menekankan hubungan manusia dalam semua bentuknya dan menggabungkan beberapa karakteristik. Dua bentuk program lainnya, yaitu program yang menuntut perbaikan kurikulum dalam rangka menekankan kontribusi sosial yang positif dari kelompok etnis dan budaya, sambil menggunakan riset tentang model belajar untuk meningkatkan prestasi siswa dan mengurangi ketegangan dalam ruangan kelas. Selain membicarakan pendidikan multikultural didalam bentuk penyajiannya dalam kurikulum, pendidikan multikultural dapat pula disajikan

dalam pengertian pengertian pendidikan yang lebih luas yaitu dalam seluruh budaya lembaga pendidikan baik dalam keluarga, lingkungan sekolah maupun masyarakat luas. Dengan demikian, pendidikan multikultural lebih tepat disebut sebagai lingkungan sekolah pendidikan multikultural yang merupakan pengembangan budaya pluralisme dalam kehidupan sekolah sebagai lembaga masyarakat.

Pendidikan multikultural dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif dan normatif, yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Pendidikan multikultural juga mencakup tentang pertimbangan terhadap kebijakan dan strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriptif ini, kurikulum pendidikan multikultural mestilah mencakup subjek seperti toleransi, tema tentang perbedaan etno-kultural dan agama bahaya diskriminasi penyelesaian konflik dan mediasi dan subjek lain yang relevan.

Melalui pendidikan multikulturalisme ini diharapkan akan dicapai suatu kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang dasar. Untuk memahami paradigma dan implementasi pendidikan multikultural, kita perlu mengenal hakekat atau nilai-nilai dasar yang tercakup di dalamnya yaitu berupa:

- a. Al-Ukhuwah, Persaudaraan
- b. Al-Hurriyah, Kebebasan
- c. Al-Musawah, Kesetaraan

Kehidupan yang harmonis, toleran dan saling menghargai atas perbedaan masyarakat, pendidikan multikultural juga membutuhkan dialogical consensus yang memuat paling tidak tiga hal penting, yaitu negosiasi, kompromi, dan konsesus.

BAB 6

IMPLEMENTASI NILAI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

A. Pengertian Implementasi

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai

perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.

3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: *“Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy”* (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Selanjutnya menurut Lister (Taufik dan Isril, 2013:136), “sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”.

Grindle (Mulyadi, 2015:47), “menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”.

Sedangkan Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan

oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Ekawati (Taufik dan Isril, 2013:136) menyatakan, “bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Kemudian Gordon (Mulyadi, 2015:24) menyatakan, “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.” Menurut Widodo (Syahida, 2014:10), “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”.

Naditya dkk (2013:1088) menyatakan, “dasar dari implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan”.

Sedangkan menurut Wahyu (Mulyadi, 2015:50), studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses

implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi. Kemudian Gunn dan Hoogwood (Tahir, 2014:55), “mengemukakan bahwa implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial”.

Menurut Meter and Horn (Taufik dan Isril, 2013:136) menekankan, “bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya; tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislatif dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati”.

Selanjutnya Pressman dan Wildavsky (Syahida, 2014:8-9) mengemukakan bahwa: “Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete” maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu

aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil”.

Pada dasarnya implementasi menurut Syaukani dkk (Pratama, 2015:229), “merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang”.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

B. Implementasi Pendidikan Multikultural

Implementasi pendidikan multikultural dapat dilakukan dalam berbagai aspek dan kelembagaan. Tilaar (2004:224) menawarkan lima program prioritas

pendidikan multikultural, yakni lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat budaya, pendidikan kewargaan, kurikulum pendidikan multikultural, kebijakan perbukuan dan pendidikan guru. Ide-ide Tilaar tersebut merupakan konsep makro yang bersifat menyeluruh. Tetapi, pada kesempatan kali ini penulis membatasi hanya pada implementasi pendidikan multikultural di sekolah, meliputi tiga hal, yaitu kultur sekolah, manajemen sekolah dan proses pembelajaran.

1. Kultur Sekolah

Kultur merupakan pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu kelompok masyarakat, yang mencakup cara berfikir, perilaku, sikap, nilai yang tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak. Kultur ini juga dapat dilihat sebagai suatu perilaku, nilai-nilai, sikap hidup, dan cara hidup untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungan, dan sekaligus cara untuk memandang persoalan dan memecahkannya. Oleh karena itu, suatu kultur secara alami akan diwariskan oleh satu generasi kepada generasi berikutnya. Sekolah merupakan lembaga utama yang yang didesain untuk memperlancar proses transmisi kultural antar generasi tersebut.

Dalam dunia pendidikan, semula kultur suatu bangsa (bukan kultur sekolah) yang diduga sebagai faktor yang paling menentukan kualitas sekolah. Tetapi berbagai penelitian menemukan bahwa pengaruh kultur bangsa terhadap prestasi pendidikan tidak sebesar yang diduga selama ini. Bukti terakhir, hasil TIMSS (*The Third international Math and Science Study*) menunjukkan bahwa siswa dari Jepang, dan Belgia sama-sama menempati pada ranking atas untuk mata pelajaran matematika, padahal kultur negara-negara tersebut berbeda. Oleh karena itu, para peneliti pendidikan lebih memfokuskan pada kultur sekolah, bukannya kultur masyarakat secara umum, sebagai salah satu faktor penentu kualitas sekolah. Tesis ini sesuai dengan temuan-temuan mutakhir penelitian di bidang pendidikan yang menekankan bahwa "faktor penentu kualitas pendidikan tidak hanya dalam wujud fisik, seperti keberadaan guru yang berkualitas, kelengkapan peralatan laboratorium dan buku perpustakaan, tetapi juga dalam wujud non-fisik, yakni berupa kultur sekolah. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa kultur sekolah adalah pola nilai-nilai, norma-norma, sikap, ritual, mitos dan kebiasaan-

kebiasaan yang dibentuk dalam perjalanan panjang sekolah. Kultur sekolah dipegang bersama baik oleh kepala sekolah, guru, staf administrasi maupun siswa, sebagai dasar mereka dalam memahami dan memecahkan berbagai persoalan yang muncul di sekolah.

Pengaruh kultur sekolah atas prestasi siswa di Amerika Serikat telah dibuktikan lewat penelitian empiris. Kultur yang "sehat" memiliki korelasi yang tinggi dengan: a) prestasi dan motivasi siswa untuk berprestasi, b) sikap dan motivasi kerja guru, c) produktivitas dan kepuasan kerja guru.

Namun demikian, analisis kultur sekolah harus dilihat sebagai bagian suatu kesatuan sekolah yang utuh. Artinya, sesuatu yang ada pada suatu kultur sekolah hanya dapat dilihat dan dijelaskan dalam kaitan dengan aspek yang lain, seperti, a) rangsangan untuk berprestasi, b) penghargaan yang tinggi terhadap prestasi, c) komunitas sekolah yang tertib, d) pemahaman tujuan sekolah, e) ideologi organisasi yang kuat, f) partisipasi orang tua siswa, g) kepemimpinan kepala sekolah, dan, h) hubungan akrab di antara guru. Dengan kata lain, dampak kultur sekolah terhadap prestasi siswa meskipun sangat kuat

tetapi tidaklah bersifat langsung, melainkan lewat berbagai variabel, antara lain seperti semangat kerja keras dan kemauan untuk berprestasi.

Di Indonesia belum banyak diungkap penelitian yang menyangkut kultur sekolah dalam kaitannya dengan prestasi siswa. Tetapi, mengingat bahwa sekolah sebagai suatu sistem di manapun berada adalah relatif sama, maka hasil penelitian di Amerika Serikat tersebut perlu mendapatkan perhatian, paling tidak dapat dijadikan jawaban hipotetis bagi persoalan pendidikan kita. Artinya, kita perlu membangun kultur sekolah yang sehat agar dapat meningkatkan prestasi belajar siswa sebagai salah satu upaya kongkrit pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia.

Kultur sekolah yang memungkinkan bagi tercapainya kesuksesan belajar siswa dari berbagai latar belakang yang berbeda perlu dirancang sedemikian rupa, sehingga sekolah menjadi komunitas yang mencerminkan living values yang ditetapkan bersama. Sejak lama sekolah-sekolah di Indonesia kehilangan *sense of identity, sense of belonging, sense of community dan sense of cooperative*. Sekolah hanya tempat belajar pengetahuan yang sifatnya

cenderung transaksional, di dalamnya guru dan kepala sekolah hanya sebagai pengelola dan penyedia ilmu yang dibeli oleh siswa sebagai konsumennya. Hilangnya identitas diri sebagai pelajar yang sedang menuntut ilmu dan kebersamaan sebagai warga sekolah telah membawa akibat-akibat yang negatif seperti sikap tidak peduli, minimnya komunikasi antara guru dan murid sehingga berakibat pada hilangnya rasa saling memiliki terhadap keberadaan sekolah dan pada gilirannya hilang pula solidaritas dan kerja sama antar warga sekolah.

Sebaliknya, para siswa membentuk wadah komunikasi sendiri yang bersifat liar dan destruktif dengan membentuk gank-gank. Itulah yang terjadi di Bandung dengan gank motornya, di Pati dengan gank Nero (Neko-neko royok), di Jakarta dan Yogya yang terkenal dengan tawuran antarsekolah. Jika keadaan ini tidak segera disadari dan diperbaiki, maka para pelajar kita akan semakin jauh dapat melaksanakan pendidikan multikultural.

Berkaitan dengan masalah di atas, hal yang dapat dilakukan adalah membenahi dan menumbuhkan kultur sekolah yang kondusif bagi pembelajaran multikultural

adalah dengan cara sebagai berikut: a) Tumbuhkan rasa bangsa dengan identitas pelajar sebagai siswa di sekolah tersebut; b) Jalin komunikasi yang efektif di antara warga sekolah, baik guru, siswa, staf sekolah maupun orang tua dan komite sekolah; c) Sosialisasikan visi dan misi sekolah berulang-ulang dengan berbagai media yang mudah dipahami siswa, misalnya dengan tulisan-tulisan yang menyentuh hati nurani dan kesadaran human seluruh warga sekolah; d) Diadakan kegiatan di luar sekolah yang mengarah pada kerjasama dan kebersamaan antara siswa dan guru. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan akan terwujud kultur sekolah yang humanistik dan menghargai keragaman.

2. Manajemen Sekolah

Sekolah yang hendak mewujudkan tujuan kesempatan dan kesetaraan dalam belajar sebagaimana yang menjadi fokus pendidikan multikultural haruslah dikelola dengan kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Kepala sekolah tidak hanya sebagai manajer, melainkan lebih dari itu. Ia harus menjadi leader (pemimpin). Pemimpin yang baik sebagaimana dinyatakan oleh John Kotler (1996:17-32) adalah yang mempunyai kepekaan terhadap

kemendesakan (*sense of urgency*), menciptakan koalisi yang memimpin perubahan, mengembangkan visi dan strategi, mengkomunikasikan visi, memberdayakan bawahan untuk aksi yang luas, mengakumulasikan keberhasilan demi keberhasilan, merayakan keberhasilan dan menghasilkan keberhasilan baru, serta menancapkan pendekatan baru dalam budaya organisasi.

Sebaliknya, kepala sekolah yang lebih cenderung bertindak sebagai manajer sering terjebak dalam manajerialisme. Manajerialisme dalam konteks ini diartikan sebagai perhatian berlebihan terhadap sistem dan struktur dalam hal yang merusak tujuan inti organisasi. Keharusan birokratis sering dicatat sebagai salah satu sasaran utama dari strategi manajemen mutu, dan itu mudah untuk menjelaskan alasannya. Berkas yang tebal dari standar prosedur operasi terlihat jauh sekali dari kegembiraan belajar dan kreativitas pengajaran. Apa yang terjadi adalah bahwa sekolah lebih mudah untuk mengelola prosedur rutin daripada memberikan kepemimpinan untuk menciptakan kultur perubahan yang kontinyu (Tony Bush & Les Bell, 2006: 145). Dengan adanya otonomi sekolah di era desentralisasi sekarang ini,

kepemimpinan kepala sekolah mempunyai peran penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan multikultural. Kepala sekolah yang dapat melaksanakan delapan tahap sebagaimana dinyatakan Kotler di atas diprediksi akan berhasil dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Prinsip kesempatan yang sama di satu sisi dan kesetaraan di pihak lain harus menjadi pedoman kepala sekolah dalam membimbing para guru dan staf sehingga siswa yang berasal dari latar belakang sosial-ekonomi dan budaya yang terpinggirkan mendapatkan perhatian yang lebih agar dapat mencapai standar kesuksesan yang telah ditetapkan. Sementara itu, siswa yang telah mempunyai keberuntungan karena perbedaan kultur dan tingkat sosial-ekonomi orang tua diberikan pengertian dan kepekaan untuk saling memahami, saling membantu dan saling peduli kepada teman-temannya yang kurang beruntung.

Sekolah juga hendaknya menciptakan kesempatan dan kegiatan yang memungkinkan siswa dapat memiliki kecakapan hidup (life skills) yang mengarah pada dikuasainya ketrampilan tertentu (pekerjaan tangan, kerajinan) untuk dapat sebagai bekal mencari nafkah,

ketika para siswa yang kurang beruntung ini tidak bersekolah lagi, karena keterbatasan yang dimilikinya. Bagi siswa yang beruntung secara sosial ekonomi, life skills berguna pula bagi hidupnya, setidaknya dengan dikuasainya ketrampilan tertentu ia akan dapat menghargai pekerjaan tangan yang selama ini sering dipandang rendah.

3. Proses Pembelajaran

Dimensi penting dalam pendidikan adalah proses pembelajaran. Pembelajaran yang mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan multikultural adalah pembelajaran yang berdasarkan pada pedagogik transformatif. Pedagogik transformatif adalah pedagogik yang mengungkapkan kebebasan dan sekaligus keterbatasan manusia, serta menekankan pentingnya partisipasi dengan sesama manusia. Partisipasi dengan sesama manusia menuntut tindakan-tindakan atau kelakuan yang mau menerima sesama manusia sebagaimana adanya. Tanggung jawab, toleransi, kerja sama, saling membantu, saling menghormati pendapat orang lain dan berbagai sikap dan serta kelakuan manusia yang memperkuat kerja sama, merupakan nilai-

nilai yang mendapatkan prioritas di dalam proses pembelajaran yang berlandaskan pedagogik transformatif. Di samping itu, pedagogik transformatif juga mengungkapkan keterbatasan manusia, implisit di dalamnya mengandung pengakuan akan kebesaran Sang Pencipta (Tilaar, 2002:152-153).

Proses pembelajaran di Indonesia sekarang ini kurang berdimensi sosial, karena lebih memperhatikan pada kesuksesan individu. Persaingan dipandang sebagai hal yang sehat agar dapat menjadi pemenang (sukses belajar). Semua itu sebenarnya adalah cara-cara belajar yang didasarkan pada filsafat individualisme dan liberalisme. Dalam konteks Indonesia, proses pembelajaran harus dilandasi semangat interdependensi, saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Prinsip win-lose solution yang mengutamakan persaingan dalam belajar harus diganti dengan win-win solution yang mengutamakan keberhasilan bersama.

Guru sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran dituntut untuk peka terhadap beragam latar belakang peserta didik. Maka, proses pembelajaran yang bersifat multikultural harus menggunakan materi yang

mengintegrasikan beragam kultur dan kondisi sosial ekonomi. Pengadopsian materi tanpa melihat konteks dan kultur masyarakat penerimanya akan berakibat buruk bagi kemajuan belajar siswa. Demikian pula, metode pembelajaran bervariasi karena disesuaikan dengan karakteristik dan cara berpikir (proses memperoleh pengetahuan) yang beragam. Teori-teori multikultural menegaskan bahwa nilai-nilai, sejarah pribadi, sikap-sikap dan keyakinan seseorang tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan yang dihasilkannya (Zamroni, 2008: 205). Di dalam suatu komunitas etnik terkandung sistem pengetahuan yang diwariskan turun-temurun yang mempengaruhi cara berpikir mereka, baik ketika berada di komunitasnya maupun di sekolah. Hal-hal tersebut harus dipahami betul oleh guru agar tidak mudah berprasangka terhadap peserta didiknya yang berakibat pada hubungan yang kurang harmonis.

Proses pembelajaran merupakan kurikulum dalam praksis. Dengan demikian keduanya tidak dapat dipisahkan. Kurikulum di Indonesia yang berlaku sekarang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum ini sebenarnya sudah bersifat multikultural.

KTSP sangat berpeluang mewujudkan tujuan pendidikan multikultural karena kurikulum ini benar-benar berpihak kepada peserta didik dalam konteks sosial-budaya dan kehidupan sehari-hari. Pengalaman belajar dikontekstualisasikan dengan kebutuhan setempat.

Ditinjau dari aspek ekonomi, sebagian besar orang Indonesia adalah orang miskin. Secara demografis mereka lebih banyak terdapat di luar Jawa dan tinggal di pedesaan. Kemiskinan menghambat orang untuk dapat mencapai kesetaraan pendidikan dan peluang untuk sukses. Lingkaran kemiskinan merupakan lingkaran setan yang sulit sekali untuk diputus rantainya.

Maka, pendidikan multikultural di Indonesia harus diprioritaskan pada upaya mengangkat peserta didik dari kelompok miskin agar mereka lebih berdaya dalam kehidupannya, dibandingkan keluarga atau masyarakatnya. KTSP memberi peluang besar untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, dalam konteks suku Asmat yang tinggal di daerah berawa-rawa, dapat dirancang pembelajaran untuk pemberdayaan mereka dalam teknologi sederhana untuk dapat menguasai alam sekitarnya, khususnya sungai serta pengelolaan sumber

daya air dan laut. Demikian pula, anak-anak di Langsa, Aceh Timur perlu belajar mengolah hasil laut, khususnya ikan dan rumput laut, yang selama ini belum tergarap, sedangkan anak-anak Halmahera sangat perlu mengembangkan kesenian tradisional dan penyelidikan flora dan fauna (Indratno, 2007:107-108).

Secara historis, pendidikan multikultural muncul pada lembaga-lembaga pendidikan tertentu di wilayah Amerika yang pada awalnya diwarnai oleh sistem pendidikan yang mengandung diskriminasi etnis, yang kemudian belakangan hari mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pendidikan multikultural sendiri merupakan strategi pembelajaran yang menjadikan latar belakang budaya siswa yang bermacam-macam digunakan sebagai usaha untuk meningkatkan pembelajaran siswa di kelas dan lingkungan sekolah. Yang demikian ini dirancang untuk menunjang dan memperluas konsep-konsep budaya, perbedaan, kesamaan dan demokrasi.

Banks menawarkan empat pendekatan untuk mengintegrasikan materi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum maupun pembelajaran di sekolah.

- 1) Pendekatan kontribusi (*the contributions approach*). Level ini yang paling sering dilakukan dan paling luas dipakai dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis. Cirinya adalah dengan memasukkan pahlawan/pahlawan dari suku bangsa/etnis dan benda-benda budaya ke dalam pelajaran yang sesuai. Hal inilah yang selama ini sudah dilakukan di Indonesia.
- 2) Pendekatan aditif (*aditif approach*). Pada tahap ini dilakukan penambahan materi, konsep, tema, perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan dan karakteristik dasarnya. Pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan buku, modul, atau bidang bahasan terhadap kurikulum tanpa mengubah secara substansif. Pendekatan aditif sebenarnya merupakan fase awal dalam melaksanakan pendidikan multikultural, sebab belum menyentuh kurikulum utama.
- 3) Pendekatan transformasi (*the transformation approach*). Pendekatan transformasi berbeda secara mendasar dengan pendekatan kontribusi dan aditif. Pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar

kurikulum dan menumbuhkan kompetensi dasar siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Perspektif berpusat pada aliran utama yang mungkin dipaparkan dalam materi pelajaran. Siswa boleh melihat dari perspektif yang lain. Banks menyebut ini sebagai proses *multiple acculturation*, sehingga rasa saling menghargai, kebersamaan dan cinta sesama dapat dirasakan melalui pengalaman belajar. Konsepsi akulturasi ganda (*multiple acculturation conception*) dari masyarakat dan budaya Negara mengarah pada perspektif bahwa memandang peristiwa etnis, sastra, musik, seni, pengetahuan lainnya sebagai bagian integral dari yang membentuk budaya secara umum. Budaya kelompok dominan hanya dipandang sebagai bagian dari keseluruhan budaya yang lebih besar.

- 4) Pendekatan aksi sosial (*the sosial action approach*) mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambah komponen yang mempersyaratkan siswa membuat aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit. Tujuan utama dari pembelajaran

dan pendekatan ini adalah mendidik siswa melakukan kritik sosial dan mengajarkan keterampilan membuat keputusan untuk memperkuat siswa dan membantu mereka memperoleh pendidikan politis, sekolah membantu siswa menjadi kritikus sosial yang reflektif dan partisipan yang terlatih dalam perubahan sosial. Siswa memperoleh pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial sehingga kelompokkelompok etnis, ras dan golongan-golongan yang terabaikan dan menjadi korban dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Empat pendekatan di atas dapat dilakukan untuk mengintegrasikan materi multikultural ke dalam kurikulum dan dapat dipadukan pada situasi pengajaran yang aktual dalam semua mata pelajaran. Hal ini akan lebih mudah diimplementasikan pada pelajaran yang berkaitan dengan sosial budaya.

Adapun implementasi pendidikan multikultural di sekolah dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan umur siswa. Sehingga implementasi pendidikan

multikultural dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- 1) Implementasi Pendekatan Kontribusi di Kelas Pada siswa TK dan SD kelas bawah (kelas I, II, III) implementasi pendidikan multikultural dapat dilakukan dengan pendekatan kontribusi, antara lain dengan cara:
 - a) Memperkenalkan beragam bentuk rumah dan baju adat dari etnis yang berbeda.
 - b) Mengajak siswa untuk mencicipi makanan yang berbeda dari berbagai daerah secara bergantian.
 - c) Mendengarkan lagu-lagu daerah lain.
 - d) Menunjukkan cara berpakaian yang berbeda, baik dari suku bangsa maupun dari negara lain.
 - e) Memperkenalkan tokoh-tokoh pejuang dari berbagai daerah dalam dan luar negeri.
 - f) Menunjukkan tempat dan cara beribadah yang berbeda.
 - g) Meminta siswa yang berbeda etnis untuk menceritakan tentang upacara perkawinan di keluarga luasnya.

- h) Memperkenalkan beberapa kosa kata penting yang berasal dari suku bangsa atau negara (ras) lain. Misalnya: matur nuwun (Jawa), muliate (Batak), thank you (Inggris), kamsia (Cina), dan sebagainya.
- i) Memperkenalkan panggilan untuk laki-laki dan perempuan. Misalnya, upik (Minangkabau), ujang (Sunda), koko (Cina), dan sebagainya.

Substansi pendidikan multikultural pada tahap ini adalah menanamkan pada siswa bahwa manusia yang hidup disekitarnya, di tempat lain, dan di dunia ini sangat beragam. Sebenarnya semua nilainya sama. Sama-sama rumah, makanan, lagu, pakaian, tokoh ibadah, perkawinan, maksud kata dan sebagainya.

Dengan demikian, siswa mulai mengerti bahwa ada cara yang berbeda, tetapi maksud dan nilainya sama sehingga dapat belajar untuk menerima perbedaan dengan proses rasa yang menyenangkan. Akhirnya, siswa merasa berbeda bukanlah masalah, melainkan anugerah.

- 2) Implementasi Pendidikan Aditif di Kelas Siswa SD kelas (IV, V, VI) dan SMP sudah mulai mampu memahami makna pendekatan aditif tepat untuk diberikan, seperti:

- a) Melengkapi perpustakaan dengan buku-buku cerita rakyat dari berbagai daerah dan negara lain.
- b) Membuat modul pendidikan multikultural untuk suplemen materi pelajaran yang lain, seperti Modul Pendidikan Multikultural untuk suplemen pendidikan IPS kelas IV (Farida Hanum dan Setya Raharja, 2006).
- c) Memutarkan CD tentang kehidupan di pedesaan, di perkotaan, dari daerah dan negara yang berbeda.
- d) Meminta siswa memiliki teman korespondensi /e-mail/ facebook atau sahabat dengan siswa yang berbeda daerah, negara, atau latar belakang lainnya.
- e) Menceritakan pengetahuan dan pengalaman guru tentang materi di daerah atau negara lain. Misalnya, guru IPA menjelaskan macam-macam tanaman dan hewan, guru Bahasa Indonesia menceritakan penyair, guru IPS menjelaskan sejarah bangsa.
- f) Mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dan menerapkannya di kelas.

Hal tersebut dilakukan untuk menanamkan pengetahuan yang luas bagi siswa. Rasa ketertarikan akan

keragaman yang diperoleh di dalam kelas akan memotivasi siswa untuk tahu lebih banyak dengan membaca, melihat di internet, berkunjung, bertanya kepada orang yang lebih tahu, dan sebagainya.

Dengan wawasan yang luas tentang keragaman budaya, kehidupan, persahabatan, dan pengetahuan, siswa akan tumbuh menjadi orang inklusif, mudah menerima perbedaan, toleran, dan menghargai orang lain. Selain itu, ia juga akan mudah berinteraksi dengan lingkungan yang baru ataupun yang kompleks.

C. Kendala Dan Upaya Pendidikan Multikultural

Multikulturalisme juga mengajarkan kepada kita bagaimana melihat kearifan budaya lokal sebagai bentuk keanekaragaman budaya yang telah lahir dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan kearifan akan muncul atau timbul setelah seseorang atau komunitas memahami adanya kondisi plural sebagai keniscayaan hidup. Dengan adanya kesadaran demikian maka seseorang akan memahami dimensi lain di luar dirinya yang ternyata sangat kompleks. Sehingga akan muncul kesadaran dalam diri seseorang bahwa keberagaman

merupakan realitas dalam kehidupan nyata yang sangat dinamik dan tidak mungkin ditolak malah harus diterima.

Idealisme dari Pendidikan Islam berbasis multikulturalisme ini memang tidak mudah untuk diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab nantinya pasti banyak pro dan kontra yang akan menyambut kehadiran konsep pendidikan baru ini. Zakiyudin Baidhawiy berpendapat bahwa selama ini konsep pendidikan Islam tidak mengalami inovasi menuju pluralisme dan multikultural sehingga membentuk kebiasaan yang membuat pendidikan Islam cenderung eksklusif dan fanatik. Menyembunyikan secara sistemik nilai saling menghargai dari berbagai kelompok dan mengabaikan kelompok minoritas terhadap kebudayaan masyarakat Indonesia. Dengan demikian salah satu kendala pada pendidikan multikultural adalah kurangnya inovasi menuju pluralisme dan multikulturalisme pada konsep pendidikan Islam.

Dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural pada dasarnya terdapat berbagai masalah, yaitu:

- a) Kendala pada aspek latar belakang lingkungan
 - Rendahnya aspirasi masyarakat terhadap pendidikan multikultural
 - Status sosial ekonomi masyarakat yang berbeda-beda
- b) Kendala pada aspek masukan
 - Minimnya pengetahuan tentang pengelolaan pendidikan multikultural
 - Keberadaan sarana dan prasarana pengetahuan pendidikan multikultural
- c) Kendala pada aspek proses pendidikan multikultural
 - Proses pengelolaan program
 - Proses kerjasama dan partisipasi

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala di atas, antara lain:

- a) Upaya pada aspek latar belakang lingkungan Perlu dilakukan penggalan dukungan dari warga masyarakat melalui program-program permohonan bantuan dana bagi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap program pengelolaan pendidikan multikultural tersebut. Dapat dengan program-program kerjasama seperti sumber

daya manusia yang berorientasi untuk meraih kesuksesan melalui pendidikan multikultural.

- b) Upaya pada aspek masukan untuk menentukan pengetahuan tentang misi Perlu dilakukan sosialisasi terhadap warga sekolah mengenai misi masing-masing program yang disosialisasikan. Perbedaan sarana dan prasarana perlu juga ditingkatkan dengan meningkatkan peraturan pelaksanaan program-program sehingga peralatan, bahan, serta ruang belajar yang bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
- c) Upaya pada aspek proses pendidikan multikultural Aspek ini memerlukan organisasi di tingkat lembaga maupun masing-masing program dengan melibatkan semua yang menyangkut di kalangan sekolah (pendidikan) seperti kepala sekolah, guru, pegawai, komite, siswa, orang tua, masyarakat, serta pemerintah.

BAB 7

STRATEGI SEKOLAH DALAM PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

A. Peran sekolah dalam pendidikan Multikultural

Lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan kemampuan peserta didik untuk memiliki pengetahuan, sikap dan bertindak dalam menghadapi realita kehidupan yang berkemajuan dan berkeadilan didasari atas perbedaan multikultur dan multi-etnis. Pendidikan multikultural merupakan proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan agama. Pemahaman ini memiliki implikasi yang sangat luas dalam pendidikan, karena pendidikan itu sendiri dapat dipahami sebagai proses tanpa akhir atau proses sepanjang hayat. Dengan demikian pendidikan multikultural menghendaki penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap harkat dan

martabat manusia dari mana pun dia datangnya dan berbudaya apa pun dia. Harapannya adalah tercipta kedamaian sejati, keamanan yang tidak dihantui kecemasan dan kebahagiaan tanpa rekayasa (Dawam, 2003: 100).

Dalam konteks relasi masyarakat yang kompleks, multikulturalisme merupakan kunci penting untuk memahami realitas kehidupan manusia. Realitas kehidupan merupakan hasil konstruksi, karena itu tidak ada realitas yang tunggal, tetapi plural. Sebab setiap individu dan komunitas sosial memiliki konstruksi sosial sendiri-sendiri. Dikatakan oleh Mahfud (2009:185-186) bahwa, dalam menghadapi pluralisme budaya dalam realitas kehidupan, diperlukan paradigma baru yang lebih toleran, yaitu paradigma pendidikan multikultural.

Hal ini penting karena akan mengarahkan anak didik untuk bersikap dan berpandangan toleran dan inklusif terhadap realitas masyarakat yang beragam, baik dalam hal budaya, suku, ras, etnis maupun agama. Paradigma ini dimaksudkan bahwa, kita hendaknya apresiatif terhadap budaya orang lain, perbedaan dan keberagaman

merupakan kekayaan dan khazanah bangsa kita. Pandangan tersebut diharapkan sikap eksklusif yang selama ini bersemayam dalam otak kita dan sikap membenarkan pandangan sendiri (*truth claim*) dengan menyalahkan pandangan dan pilihan orang lain dapat diminimalisasi atau dihilangkan.

Banyak fakta di negeri kita ini tentang kerusuhan dan konflik yang terjadi disebabkan oleh SARA (suku, adat, ras dan agama). Bukti ini menunjukkan salah satu kegagalan dalam proses pendidikan dalam menciptakan dan mengembangkan kesadaran dan tindakan dalam pluralisme dan multikulturalisme. Simbol budaya, ideologi, agama, bendera, baju dan atribut lainnya, sebenarnya boleh berbeda, namun pada hakikatnya kita adalah satu yaitu satu bangsa, satu tanah air. Kita setuju dalam perbedaan (*agree in disagreement*). Pada dasarnya manusia diciptakan Tuhan dengan berbeda jenis kelamin, suku, bangsa, warna kulit, budaya, dan sebagainya dimaksudkan agar saling kerjasama dan tolong menolong. Agar diketahui oleh manusia bahwa, yang paling mulia kedudukannya di sisi Tuhan adalah yang paling baik amal perbuatannya (bertaqwa). Jadi adanya

perbedaan manusia di dunia ini merupakan sebuah keniscayaan dan sunnatullah yang bersifat alami. Disebutkan dalam Alqur'an, S. 49: 13, arti dalam bahasa kita: "Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan menjadikan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal (kerja sama). Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Tuhan adalah yang paling bertaqwa. Sungguh Tuhan Maha Mengetahui lagi Maha Menenal.

Proses pendidikan di sekolah, guru memiliki peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar, ia merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pendidikan multikultural yang menentukan dalam mencapai keberhasilan dalam mendorong, memahami dan berperilaku dalam realita kehidupan berdasarkan lintas budaya dari para peserta didik. Materi yang disampaikan, cara mengajar dan kepribadian guru dapat mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah yang diasumsikan peserta didik memiliki beragam latar belakang agama, etnik, bahasa dan budaya.

Bangsa Indonesia yang multikultur mutlak harus dipandang dari kaca mata multikulturalisme. Dipaparkan oleh Magnis Suseno (2005) bahwa, Indonesia hanya dapat bersatu, bila pluralitas agama yang menjadi kenyataan sosial dihormati. Ini dimaksudkan multikulturalisme agama tidak akan menghilangkan identitas setiap komponen bangsa dan partisipasi agama-agama, tetapi harapannya agar semuanya menjadi warga negara Indonesia tanpa merasa terasing. Sikap saling menghormati identitas masing-masing dan kesediaan untuk tidak memaksakan pandangan agama sendiri tentang yang baik kepada siapapun merupakan syarat keberhasilan masa depan Indonesia. Untuk itu itu diperlukan transformasi kesadaran multikulturalisme menjadi identitas nasional dan menempatkan agama menjadi fondasi kesatuan bangsa.

Di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah guru perlu memiliki strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuannya. Strategi yang perlu digunakan ada bermacam-macam seperti: diskusi, simulasi, bermain peran, observasi, studi kasus, problem solving (Aly, 2003: 60-73). Melalui diskusi guru dapat memberikan masukan

dan memperoleh informasi dari peserta didik tentang sumbangan aneka budaya dan orang dari suku lain dalam hidup bersama sebagai bangsa. Pembelajaran dengan diskusi ini dapat bertukar pikiran bahwa semua orang dari budaya apapun ternyata menggunakan hasil kerja orang lain dari budaya lain. Pembelajaran dengan simulasi dan bermain peran, peserta didik difasilitasi untuk memerankan diri sebagai orang-orang yang memiliki agama, budaya dan etnik yang berbeda dalam pergaulan sehari-hari. Dalam kegiatan-kegiatan tertentu perlu dilakukan bersama dengan kepanitiaan bersama yang melibatkan aneka macam latar belakang peserta didik dari berbagai agama, etnik, budaya, bahasa. Melalui observasi dan studi kasus peserta didik dan guru mengadakan kegiatan bersama di dalam realita kehidupan masyarakat kultural. Kegiatan tersebut diharapkan untuk dapat mengamati proses sosial yang terjadi antara individu dan kelompok yang ada, sekaligus untuk melakukan mediasi bila ada konflik di antara warga masyarakat tersebut.

Indonesia merupakan bangsa multietnik dan multikultural. Keaneka ragaman masyarakat merupakan

realitas objektif yang tidak dapat dipungkiri sebagai sebuah keniscayaan. Aneka masyarakat dan budaya tersebut tercermin dengan adanya keragaman agama, etnik, bahasa, budaya, wilayah geografis, latar belakang historis dan psikologis. Perbedaan tersebut pada satu sisi dapat memberi warna positif pada sistem nilai budaya bangsa, bila terwujud dalam bentuk interaksi yang harmonis, saling menghargai dan saling kerja sama, namun di sisi lain dapat menjadi sumber konflik, bila tidak disikapi secara bijak, apalagi untuk dapat menjadikan sebagai satu kesatuan dalam mengembangkan sumber kekuatan dalam pembangunan bangsa dan negara. Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat diberdayakan dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda namun menjadi satu kesatuan, ini adalah acuan normatif dalam mengelola kemajemukan bangsa menjadi sumber potensi dan kekuatan bangsa Indonesia sebagai cita-cita bersama dalam mewujudkan demokrasi menuntut adanya apresiasi dan sikap yang bijak terhadap keragaman diperlukan pengelolaan secara sinergis. Bila tidak dikelola dengan baik, ada kemungkinan terjadi

persaingan antara budaya, etnis, agama yang dapat mendatangkan permasalahan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh di negara Perancis masih menyisakan masalah berupa kerusakan besar tahun 2005 sebagai akibat penerapan konsepsi demokrasi egalitarian lahir, yang tidak memperhatikan pluralitas bangsa.

Di dalam lembaga pendidikan perlu mengembangkan kesadaran kolektif dan kepekaan terhadap kenyataan kemajemukan, pluralitas bangsa baik etnis, budaya, agama, hingga orientasi politik, karena itu pendidik dan tenaga kependidikan tidak layak bila memperlihatkan sikap dan perilaku yang bersifat diskriminatif, menghina, melecehkan etnis, budaya, agama di dalam kehidupan sekolah. Sikap dan tindakan respek terhadap multietnis dan multikultural harus menjadi bagian dari materi pembelajaran atau kurikulum pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, jenis pendidikan baik sekolah yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat dalam membangun dan mengembangkan budaya baru menuju masyarakat multibudaya yang berbasis saling

menghargai, menghormati dan harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemahaman tentang masyarakat majemuk, bila memenuhi dua pengertian berikut: (1) masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari komunitas etnik yang berbeda-beda hidup terpisah dari masing-masing memiliki moralitas tersendiri, (2) masyarakat yang hidup dalam satu komunitas yang sama namun dipisahkan satu sama lain oleh suatu kepentingan. Masyarakat multikultural itu bersifat dinamis, jika masyarakat telah mengalami perubahan menjadi masyarakat bermentalitas modern. Di dalam masyarakat ini diperlukan seperangkat nilai yang didasarkan pada moralitas bersama haruslah diterapkan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat majemuk guna memperoleh kenyamanan, keharmonisan dan stabilitas eksistensial.

Di dalam masyarakat modern, lembaga pendidikan paling tidak memiliki tiga fungsi utama antara lain: (1) pendidikan berfungsi untuk mempersiapkan individu-individu sesuai dengan kriteria keahlian, (2) pendidikan mengajarkan kemampuan-kemampuan praktis yang

dibutuhkan oleh setiap orang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, (3) pendidikan berfungsi untuk mengajarkan nilai-nilai moral. Sekolah sebagai agen perubahan (*change agent*) diharapkan dapat menyediakan ketrampilan hidup (*life skill*) dan moralitas publik kepada peserta didik. Masyarakat haruslah berpartisipasi di dalam proses pendidikan di sekolah, dengan memberikan sumbangsih pemikiran yang dapat mendorong dan mengembangkan cakrawala pendidikan menuju masyarakat multikultural yang harmonis.

Guru merupakan ujung tombak dari pendidikan multikultural dalam usaha menentukan keberhasilan pemahaman lintas budaya peserta didik, cara mengajar, kepribadian guru, materi pembelajaran dapat mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran dalam mendukung pengembangan situasi dan kondisi yang kondusif di sekolah berdasarkan pada kehidupan multikultural bagi warga sekolah khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya.

B. Strategi Sekolah dalam Proses Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pendidikan multikultural adalah kegiatan belajar mengajar yang memberikan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tindakan dalam mengembangkan atas kondisi perbedaan dan persamaan peserta didik terkait dengan jenis kelamin, ras, budaya, etnik dan agama. Proses pembelajaran ini dapat mengembangkan kondisi yang kondusif yang memandang keunikan peserta didik tanpa membedakan karakteristik latar belakang budayanya. Seorang guru perlu mengidentifikasi konsep tentang visi dan tujuan yang jelas mengenai pendidikan multikultural yang diajarkan dan dikembangkan di sekolah guna memberikan pengetahuan, sikap dan perilaku kepada seluruh peserta didik dan warga sekolah, sehingga suasana sekolah mampu mengembangkan dan mengimplementasikan interaksi edukatif dan interaksi sosial yang berdasarkan nilai-nilai multietnis dan multibudaya. Dalam lingkungan sekolah.

Implementasi pendidikan multikultural di sekolah memiliki beberapa spesifikasi. Dikatakan oleh Banks

(1993: 254) bahwa sekolah yang memiliki komitmen mengembangkan pluralisme harus nampak di dalam: (1) mengembangkan respek aktivitas sekolah terhadap keragaman etnik, (2) mengembangkan kohesivitas berdasarkan partisipasi bersama dari beberapa kelompok budaya, (3) memberi kesempatan maksimal untuk seluruh individu dan kelompok, (4) memfasilitasi perubahan konstruktif yang dapat meningkatkan martabat dan cita-cita demokrasi.

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah perlu memperhatikan aspek-aspek di atas dengan cara-cara: pertama, mengajar bukanlah sekedar mengucapkan kata-kata, namun perlu memberi kesempatan peserta didik untuk mengembangkan dan aktif mencari serta mengolah pengetahuan/informasi yang diperoleh, sehingga menjadi suatu pemahaman yang terintegrasi dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik, kedua, pengembangan budaya agar dapat difahami dengan baik dan bersifat sesuai dengan realita kehidupan peserta didik, ketiga, peserta didik datang ke sekolah dengan pengetahuan awal yang dimilikinya, sehingga pembelajaran harus mampu

mengkaitkan konsep baru dengan pengalaman yang telah dimilikinya.

Kegiatan pembelajaran pendidikan multikultural menurut Zubaidi (2004: 77) adalah guru dituntut mau dan mampu menerapkan strategi pembelajaran kooperatif harus menerapkan di antaranya: adanya saling ketergantungan, adanya interaksi tatap muka yang membangun, pertanggung jawaban secara individu, ketrampilan sosial dan efektivitas proses pembelajaran dalam kelompok. Sekolah yang mengelola pendidikan berdasarkan multikultural senantiasa menghormati, menghargai perbedaan yang ada pada warga sekolah dengan latar belakang nilai agama, suku, ras, bahasa, etnis dan golongan yang ada di sekolah, baik terhadap peserta didik, guru, karyawan, staf kependidikan maupun komite sekolah dan semua komponen yang berkepentingan dengan sekolah. Strategi pembelajaran yang diterapkan pendidik berdasarkan pendidikan multikultural di sekolah dengan mengacu pada proses pembelajaran yang dikembangkan oleh Sudjana (1997: 26) yakni: (1) model pengembangan, maksudnya proses belajar mengajar dikembangkan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan

manusia, (2) model konsep diri, yakni pengembangan proses pembelajaran yang menekankan pada pentingnya kepribadian siswa yang kuat, dengan strategi pembelajarannya membantu siswa menjelaskan pikiran dan perasaan tentang dirinya dan nilai-nilai dasar kemanusiaan serta dapat merefleksikan pemahaman tentang dirinya, (3) model kepekaan dan orientasi kelompok, dimaksudkan untuk membantu keterbukaan pikiran dan kepekaan siswa terhadap orang lain. Strategi pembelajaran ini dapat dilakukan dengan melalui kelompok yang efektif, (4) model perluasan penyadaran proses belajar mengajar dimaksudkan untuk penyadaran terhadap kekuatan dan penggunaan fungsi otak kiri dan kanan, (5) model pembelajaran partisipatif, yakni proses pembelajaran berdasarkan kebutuhan, berorientasi pada tujuan, berpusat kepada peserta didik dan belajar berdasarkan pengalaman dalam kehidupan. Strategi pembelajaran ini melibatkan peserta didik yang dikelola dan diselenggarakan oleh guru dalam tiga (3) tahap kegiatan belajar mengajar yakni perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Kegiatan ini

dapat dilakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Realitas praktek pendidikan selama ini memberikan kesan bahwa pendidikan menganut asas subject matter oriented yang membebani peserta didik dengan informasi-informasi kognitif dan motorik yang kadang-kadang kurang relevan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan psikis mereka. Pengelolaan pengajaran yang ada memberi kesan terlalu berorientasi pada iptek, termasuk ketrampilan motorik yang terlalu berorientasi pada teknis. Asas ini memang dapat menghasilkan lulusan yang pandai, cerdas dan trampil, yang kurang diimbangi dengan kecerdasan emosional. Dalam usaha pelaksanaan demokratisasi pendidikan asas subject matter oriented dapat diubah menjadi student oriented. Orientasi pendidikan ini menekankan pada pertumbuhan, perkembangan dan kebutuhan peserta didik secara utuh, baik lahir maupun batin. Dalam hal ini kecerdasan otak memang penting, namun kecerdasan-kecerdasan yang lain, seperti: kecerdasan emosional, spiritual dan berbagai tipe kecerdasan lainnya, juga tidak kalah pentingnya.

Demokratisasi di sekolah tidak hanya berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas, namun berkaitan dengan keseluruhan dimensi pendidikan, termasuk aspek kelembagaan. Dalam kerangka kelembagaan, sebuah sekolah layak disebut sebagai sekolah yang demokratis bila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) sangat berorientasi normatif, yakni manajemen harus selalu didasarkan pada kesepakatan. Apa pun program yang hendak dikembangkan diimplementasikan harus didasarkan pada kesepakatan seluruh komponen yang ada di sekolah. Ini suatu keharusan tidak hanya menjadi values, tetapi juga sebagai sebuah keyakinan bahwa model inilah yang terbaik, (2) pendekatan demokratis sangat layak untuk organisasi dengan para anggota dari kalangan profesional, yakni mereka yang memiliki kemampuan secara teknis dan ketrampilan serta memiliki otoritas dalam keahliannya. Organisasi sekolah dikelola oleh kalangan profesional, karena anak didik memerlukan pembinaan dan pelayanan dari mereka yang memiliki otoritas dalam bidangnya, (3) penanaman nilai, kultur dan kebiasaankebiasaan dalam organisasi dilakukan oleh anggota itu sendiri yang sudah dimulai sejak dalam fase

pendidikan dan tahun-tahun pertama mereka bekerja, (4) pengambilan keputusan tentang berbagai kebijakan penting dilakukan oleh sebuah komite dan tidak dilakukan secara individual oleh seorang kepala sekolah dengan menggunakan otoritas kepemimpinannya dan semua unsur memiliki wakil dalam komite tersebut yang harus mempertanggungjawabkan keterlibatannya dalam komite terhadap konstituennya, (5) semua keputusan ditetapkan dengan cara konsensus atau kompromi dan sedapat mungkin dihindari polarisasi organisasi karena perbedaan pendapat dan pandangan. Perbedaan dalam proses harus diakhiri dengan konsensus atau kompromi, walaupun terkadang harus menghargai kecenderungan mayoritas (Rosyada, 2004: 228-229).

Beberapa strategi tersebut di atas dapat diterapkan di sekolah dalam pendidikan multikultural, namun diperlukan adanya penyesuaian situasi dan kondisi serta tujuan yang ingin dicapai sekolah. Tujuan pendidikan multikultural dalam kerangka fokus pada pelestarian budaya dan partisipasi budaya dalam mengembangkan sikap dan perilaku peserta didik dalam menghadapi kelompoknya di dalam masyarakat, sehingga peserta didik

di sekolah dan di luar sekolah, baik dalam keluarga maupun masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan multikultural sebagai satu kekuatan dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang damai, aman dan tenteram.

Tahapan dalam pengembangan strategi sekolah dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan belajar mengajar yang berbasis multikultural dapat menerapkan beberapa cara antara lain:

- a. Strategi kegiatan belajar bersama (*cooperative learning*) maksudnya kegiatan belajar mengajar yang memperhatikan adanya perubahan kemampuan siswa dalam belajar bersama-sama guna mensosialisasikan nilai-nilai dan konsep budaya daerah dalam kelompok belajar secara bersama-sama dengan memperhatikan latar belakang perbedaan yang ada.

Strategi ini diharapkan peserta didik mampu berpartisipasi dalam memandang nilai-nilai lokal dan mengembangkan sikap kebangsaan. Pengalaman yang diperoleh dalam kondisi ini peserta didik dapat memperoleh kemampuan dan kecakapan dalam

menghargai dan menghormati budaya lain, mengembangkan toleransi terhadap perbedaan budaya yang majemuk bersifat akomodatif, terbuka dan jujur dalam berinteraksi dengan orang (kelompok) lain yang berbeda suku, agama, ras, etnis dan budayanya, memiliki rasa simpati dan empati terhadap budaya lain dan mampu mengelola konflik dengan baik tanpa kekerasan. Kegiatan ini dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas kegiatan bersama, suasana kegiatan yang kondusif, membangun interaksi yang aktif dan positif antara peserta didik dengan guru, sesama peserta didik, dalam kegiatan bersama di sekolah.

- b. Strategi pencapaian konsep (*concept attainment*) yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar guna memfasilitasi peserta didik dalam melaksanakan kegiatan studi budaya lokal dari daerah dalam kelompok belajarnya
- c. Strategi analisis nilai (*value analysis*) bertujuan untuk melatih kemampuan peserta didik mengembangkan berpikir secara konstruktif dari ranah ekspresi dan komitmen nilai-nilai budaya lokal menuju kerangka

dan struktur bangunan tentang cara pandang yang lebih luas dalam lingkup nasional atas dasar sikap kebangsaan.

- d. Strategi analisis sosial (*social analysis*) bertujuan untuk memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dalam kehidupan masyarakat yang memiliki beragam budaya, etnik, agama, adat istiadat, sehingga siswa dapat menganalisis berbagai latar belakang tersebut dalam membangun dan mengembangkan pemahaman dan kesadaran tentang perbedaan kultural dalam masyarakat, sehingga dapat muncul respon positif, yakni sikap menghargai, menghormati beragam budaya dalam kerangka kehidupan berbangsa, bernegara dan era globalisasi.

Strategi sekolah dalam pembelajaran pendidikan multikultural merupakan program pendidikan bangsa agar komunitas multikultural dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang ideal bagi bangsanya. Lembaga pendidikan berperan dalam menyatukan bangsa secara demokratis dengan menekankan pada perspektif pluralitas masyarakat dengan berbagai suku, etnik, kelompok budaya yang

berbeda. Sekolah perlu mengkondisikan untuk mencerminkan praktik nilai-nilai demokrasi, menampakkan aneka kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat, bahasa dan dialek, para siswa lebih baik berbicara tentang menghormati, menghargai di antara mereka dan menjunjung tinggi nilai-nilai kerja sama.

Proses pendidikan di sekolah berbasis multikultural didasarkan pada gagasan filosofis tentang kebebasan, keadilan, kesederajatan dan perlindungan terhadap hak manusia. Hakikat pendidikan multikultural mempersiapkan peserta didik untuk belajar secara aktif menuju pada kesamaan struktur dalam organisasi sekolah. Proses pendidikan berbasis multi kultural berusaha memberdayakan peserta didik untuk mengembangkan rasa hormat kepada orang yang berbeda budaya, memberi kesempatan untuk bekerja sama dengan orang lain yang berbeda etnis secara langsung, mengakui ketepatan dari pandangan-pandangan budaya yang beragam, membantu peserta didik dalam mengembangkan kebanggaan terhadap warisan budaya mereka, menyadarkan peserta

didik bahwa pertentangan nilai-nilai kehidupan sering menjadi penyebab konflik antara kelompok masyarakat.

BAB 8

LANDASAN HISTORIS, IDEOLOGIS, DAN YURIDIS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

A. Landasan Historis dan Ideologis pendidikan Sekolah Dasar

Landasan historis dan ideologis adalah dasar pemikiran yang diangkat dari fakta sejarah yang relevan tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Sekolah Dasar beserta ide-ide atau pertimbangan yang melatarbelakanginya. sejak pada masa Hindia Belanda sampai saat ini. Tentu saja dalam modul ini tidak akan dibahas sejarah pendidikan SD secara rinci, melainkan hanya kita ambil tonggak-tonggak sejarahnya yang memberi makna pada kita. Pembahasan rinci tentang hal itu, dapat Anda jumpai dalam buku-buku tentang Sejarah Pendidikan di Indonesia.

Secara historis atau kesejarahan, pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan pada masa Hindia Belanda yang memang

dibangun lebih banyak untuk kepentingan penjajahan Belanda di Indonesia. Pada dasarnya sistem pendidikan pada masa itu ditekankan pada upaya memperoleh tenaga terampil yang mengerti nilai budaya penjajah sehingga menguntungkan mereka dalam mempertahankan dan melangsungkan penjajahannya. Dalam konteks itu orang Indonesia, yang disebut juga bumi putra, diperlakukan sebagai hamba atau onderdaan. Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan pergaulan dunia sistem pendidikan Hindia Belanda pun pada jamannya itu terus mengalami perubahan yang dinamis. Seperti diungkapkan oleh Djojonegoro (1996: 2) sebagai berikut:

Sistem pendidikan Indonesia dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa berkembang secara dinamis pada lingkungan masyarakat yang juga berkembang dalam dimensi ideologi, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dalam perkembangannya dari waktu ke waktu, pendidikan di bumi nusantara secara konsisten dianggap berfungsi sebagai wahana transformasi, transmisi, dan sosialisasi nilai-nilai, tradisi, ilmu pengetahuan, serta teknologi dan seni dari masyarakatnya, yang berlangsung

baik melalui jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.

Pendidikan Sekolah Dasar merupakan bagian dari jalur pendidikan sekolah. Merujuk pada paparan Djojonegoro (1996: 12-28), perkembangan pendidikan sekolah dasar pada jaman penjajahan Belanda secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Sekolah Dasar pertama kali didirikan pada zaman VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) pada tahun 1617 yang menjelma menjadi Sekolah Batavia (*Bataviasche School*) pada tahun 1622 dan ditutup tahun 1632. Sejenis Sekolah Dasar itu pada tahun 1630 didirikan oleh masyarakat Sekolah Warga masyarakat (*Burger School*) untuk tujuan pendidikan budi pekerti.
2. Pada akhir abad ke 18 dan awal abad ke 19 Pemerintah Hindia Belanda mulai menangani pendidikan untuk Bumi Putra dengan tujuan untuk memperoleh tenaga terampil untuk kepentingan penjajahan dengan model dualistik. Untuk golongan penduduk Eropa dan Bumi Putra didirikan dua sekolah yang berbeda. Untuk Bumi Putra didirikan dua jenis Sekolah Dasar, yakni Sekolah Dasar Kelas

Pertama (*de scholen der eerste klasse*), yang kemudian berkembang menjadi HIS (*Hollandsch Inlandsche School*) yang diperuntukkan bagi anak tokoh pribumi, bangsawan, atau orang kaya; dan Sekolah Dasar Kelas Dua (*de scholen der tweede klasse*) yang diperuntukkan bagi pribumi pada umumnya. Di sini sudah mulai dilakukan segregasi sosial bagi Bumi Putra.

3. Pada abad ke 20, sejalan dengan terjadinya perubahan yang terjadi di seluruh dunia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya mendesak pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan perubahan dalam melaksanakan sistem pendidikannya, dengan landasan Politik Etis (*Etische Politiek*).

Pendidikan Sekolah Dasar tetap bersifat dualistik. Ada dua jenis Sekolah Dasar yakni:

- a) Sekolah Dasar berbahasa Belanda untuk anak keturunan Eropa dan timur asing, serta pribumi terkemuka/kaya yang disebut dengan Sekolah rendah Eropa (*Europesche Lager School* atau *ELS*); dan

- b) Sekolah Dasar berbahasa daerah untuk keturunan pribumi pada umumnya yang disebut Sekolah Rendah Bumi Putera (*Inlandsche School*) dan Sekolah Bumi Putera – Belanda (*Hollandsch Inlandsche School* atau *HIS*) untuk pribumi terkemuka/ bangsawan. Khusus Sekolah Bumi Putera terbagi dua yakni Sekolah Bumi Putera Kelas Dua dengan masa belajar lima tahun (*Inlandsche School*) dan Sekolah Desa (*Volks School*) dengan masa belajar tiga tahun, sebagai sekolah Bumi Putera kelas pertama. Selain itu ada Sekolah Peralihan dari *Volks School* ke Sekolah Dasar berbahasa Belanda yang dikenal *Schakelshool* dengan lama belajar lima tahun, sama dengan *HIS*, yang diperuntukkan bagi Bumi Putera.
4. Pada masa perjuangan kemerdekaan, yakni antara tahun 1908 Kebangkitan Nasional dan masa Pendudukan Jepang sampai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 berkembang berbagai gerakan pendidikan yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat yang sudah tercerahkan sebagai komponen bangsa yang sadar akan pentingnya

pembangunan bangsa. Gerakan pendidikan yang di dalamnya tercakup pendidikan setingkat Sekolah Dasar dilakukan oleh Perguruan Taman Siswa dengan Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh utamanya; Perguruan Muhammadiyah dengan Kyai Haji Achmad Dahlan sebagai tokoh sentranya, dan Pendidikan Maarif dengan Kyai Haji Masmansur sebagai salah seorang tokohnya.

Sekolah Dasar dalam konteks Perguruan Taman Siswa disebut Taman Muda dengan masa belajar empat tahun, Dalam konteks Perguruan Muhammadiyah Sekolah Dasar disebut Volksschool dengan masa belajar tiga tahun, Sultaanatschool, juga tiga tahun yang dikelola oleh Kesultanan, Vervolgsschool dengan masa belajar dua tahun serta HIS Muhammadiyah. dengan masa belajar empat tahun. Dalam konteks pendidikan Maarif pendidikan setingkat Sekolah Dasar disebut Madrasah, yang sampai saat ini kita kenal adanya Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan masa belajar bervariasi dan belum memasukan pendidikan umum tetapi dominan pendidikan agama. Berbagai organisasi Islam lainnya

di seluruh Indonesia melakukan kiprah pendidikan serupa dengan ketiga organisasi kemasyarakatan tersebut.

Dari fakta sejarah pendidikan Sekolah Dasar pada zaman Hindia Belanda, kita dapat menangkap makna bahwa segregasi sosial dan diskriminasi secara sengaja dilakukan terhadap anak penduduk Bumi Putera dalam memperoleh kesempatan belajar di Sekolah Dasar, tergantung pada latar belakang sosial, ekonomi dan budaya. Ideologi ini ternyata masih kita jumpai dalam instrumentasi dan praksis sistem pendidikan nasional setelah Indonesia merdeka. Hal lain yang sangat penting adalah dengan tumbuhnya berbagai gerakan pendidikan pada masa perjuangan kemerdekaan, yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa, tumbuh dan berkembang pula konsep dan dasar ideologi pendidikan yang walaupun berbeda dalam nomenklatur dan konteks perwujudannya, tetapi kesemuanya mengarah pada satu tujuan adanya sistem pendidikan yang inheren dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia, contohnya filsafat dan ideologi pendidikan Taman

*Siswa Ing madya mangun karsa, Ing Ngarsa sung
Tulada, Tut Wuri Handayani.*

B. Landasan Historis-Ideologis Dan Yuridis Pendidikan SD

Landasan historis-ideologis dan yuridis pendidikan Sekolah Dasar pada bagian ini akan kita bahas dari sudut pandang pemikiran tentang sistem pendidikan nasional sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan sekarang. Dengan demikian kita akan memahami secara utuh perkembangan Sekolah Dasar di zaman kemerdekaan, zaman kita hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu kita akan membahas hal itu sekaligus dari sisi sejarahnya sejak tahun 1945, ideologi pendidikan yang dikembangkan, serta berbagai ketentuan perundang-undangan tentang semua itu sebagai landasan yuridis formal pendidikan nasional. Landasan ideologis dan yuridis pendidikan pada dasarnya merupakan komitmen politik Negara Republik Indonesia yang diwujudkan dalam berbagai ketentuan normatif konstitusional yang mencerminkan bagaimana sistem

pendidikan nasional dibangun dan diselenggarakan untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

Ketika bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan ditetapkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 dan terpilihnya Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pertama, maka secara yuridis seluruh pengaturan tentang sistem pendidikan nasional berada di bawah kekuasaan Pemerintah RI. Karena kehidupan bermasyarakat dan berbangsa Indonesia sebelum merdeka berlanjut menjadi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia, maka apa yang telah dirintis dan dikembangkan dalam rangka pendidikan Hindia Belanda dan Jepang sebelum kemerdekaan itu menjadi modal dasar bagi sistem pendidikan nasional Indonesia, termasuk di dalamnya sistem pendidikan yang berkenaan dengan pendidikan Sekolah Dasar.

Dalam kurun waktu tahun 1945 sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), telah berlaku tiga Undang-Undang yang mengatur Sistem Pendidikan Nasional, yakni UU RI Nomor 4 Tahun 1950,

UU RI No. 22 Tahun 1961, dan UU RI No. 2 Tahun 1989. Tahun 1945-1950, pendidikan Sekolah Dasar termasuk jenjang Pendidikan Rendah dengan sebutan Sekolah Rakyat (SR) dengan masa belajar enam tahun. Dalam UU RI No. 4 Tahun 1950 dan UU RI No. 22 Tahun 1961 pendidikan Sekolah Dasar termasuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar yang mencakup Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan lama belajar masing-masing 6 tahun. Sementara itu menurut UU RI No. 2 Tahun 1989 pendidikan Sekolah Dasar termasuk jenjang Pendidikan Dasar yang mencakup SD dan MI serta Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Saat ini pendidikan Sekolah Dasar diselenggarakan atas dasar UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dalam konsideran Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional digariskan bahwa: (1) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; (3) sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, secara ideologis dan yuridis ditetapkan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar atau fondasi pendidikan nasional. (Pasal 2 UU 20 Tahun 2003). Hal ini mengandung makna bahwa pendidikan nasional, termasuk di dalamnya pendidikan di SD/MI

harus sepenuhnya didasarkan pada cita-cita, nilai, konsep dan moral yang terkandung dalam bagian dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan di SD/MI bukanlah pendidikan sekuler tetapi pendidikan yang berjiwa Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pendidikan Agama Akhlak Mulia sebagai salah satu Mata Pelajaran wajib dalam Kurikulum pendidikan dasar dan menengah (UU 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, Pasal 27 beserta Penjelasannya, dan PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang SNP dalam Pasal 6).

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pendidikan SD/MI wajib mewujudkan fungsi pendidikan nasional yang mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa. Sedangkan yang menjadi tujuan pendidikan SD/MI merupakan bagian yang inheren dari tujuan pendidikan nasional dalam konteks anak usia SD/MI, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Pasal 2 UU 20 Tahun 2003).

Hal ini mengandung makna bahwa pendidikan SD/MI merupakan lingkungan pendidikan formal terdini untuk menapaki perjalanan mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa pendidikan harus dimaknai sebagai "... usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara." (Pasal 1 huruf 1 UU 20 Tahun 2003).

Pendidikan dasar, atau dalam wacana akademis dikenal dengan *basic education*, merupakan bagian dari struktur pendidikan formal yang paling rendah, yang dalam Pasal 17 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dinyatakan bahwa *Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah* (ayat 1). Satuan pendidikan pada jenjang ini dapat berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat (ayat 2). Yang dimaksud dengan ...yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B. Secara lebih spesifik penjabaran tujuan pendidikan pada SD/MI, dalam Pasal 11 RPP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Versi 21 Februari 2007) dikemukakan sebagai berikut.

1. Pendidikan dasar berfungsi menanamkan nilai-nilai, sikap, dan rasa keindahan, serta memberikan dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung serta kapasitas

belajar peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah dan/atau untuk hidup di masyarakat, sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

2. Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Dengan demikian maka pendidikan SD mengemban dua fungsi, yakni fungsi pengembangan potensi peserta didik secara psikologis dan pemberian landasan yang kuat untuk pendidikan SMP dan seterusnya. Sedangkan tujuannya secara substantif merujuk pada tujuan pendidikan nasional. Sesuai dengan prinsip pendidikan yang terbuka, multimakna, demokratis dan tidak diskriminatif, pendidikan SD ini juga menerapkan prinsip perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan SD dan

antar jalur pendidikan SD dengan jalur pendidikan nonformal dan informal.

Mengenai hal itu diatur dalam Pasal 15 (RPP Wajar) sebagai berikut.

1. Peserta didik pada SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat berhak pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang setara.
2. Peserta didik yang belajar secara mandiri berhak pindah ke SD, MI, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat setelah melalui tes penempatan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
3. Peserta didik yang belajar di negara lain pada jenjang pendidikan dasar berhak pindah ke SD, MI, SMP, atau MTs, atau bentuk lain yang sederajat.

BAB 9

KONSEP PENDIDIKAN DASAR DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN KI HAJAR DEWANTARA

A. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara

Terbelenggu dalam pusaran tirani penjajahan Belanda, telah mendorong Ki Hajar Dewantara untuk memaknai pendidikan secara filosofi sebagai upaya memerdekakan manusia dalam aspek lahiriah (kemiskinan dan kebodohan), dan batiniah (otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, mentalitas demokratis). Filosofi dalam pendidikan mencakup suatu kebijakan-kebijakan pendidikan yang baru, mengusulkan cita-cita yang baru tanpa mempertimbangkan persoalan filosofis seperti hakikat kehidupan yang baik, kemana pendidikan diarahkan. Sebuah filosofi memiliki bagian yang penting yaitu mencari sebuah norma-norma serta tujuan. Dengan itu filosofi dapat mendorong manusia

memperluas bidang kesadaran untuk menjadi lebih baik, lebih cerdas dan lebih aktif.

Selain itu dapat menumbuhkan keyakinan akan agama dengan fondasi yang matang secara intelektual dalam diri manusia. Bagi Ki Hajar Dewantara, para guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan kerohanian, baru kemudian menyediakan diri untuk menjadi pahlawan dan juga menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa. Dengan kata lain, yang diutamakan sebagai pendidik pertama-tama adalah fungsinya sebagai model atau figure keteladanan, baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar. Oleh karena itu, nama Hajar Dewantara sendiri memiliki makna sebagai guru yang mengajarkan kebaikan, keluhuran, keutamaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak.

Adapun tujuannya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dengan berbagai ide yang dimiliki dari Ki Hajar Dewantara ada

satu konsep yang terlupakan. Ki Hajar pernah melontarkan konsep belajar 3 dinding. Kalau kita mengingat masa lalu ketika masih di bangku sekolah, bentuk ruang kelas kita rata-rata adalah persegi empat. Ki Hajar menyarankan ruang kelas itu hanya dibangun 3 sisi dinding saja. Ada satu sisi yang terbuka. Konsep ini bukan main-main filosofinya. Dengan ada satu dinding yang terbuka, maka seolah hendak menegaskan tidak ada batas atau jarak antara di dalam kelas dengan realita di luar.

Menurut Ki Hajar Dewantara, Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Lingkungan pendidikan meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan organisasi pemuda, yang ia sebut dengan Tri Pusat Pendidikan.

- a. Lingkungan Keluarga (Primary Community); Pendidikan Keluarga berfungsi:
 - 1) Sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak,

- 2) Menjamin kehidupan emosional anak,
- 3) Menanamkan dasar pendidikan moral,
- 4) Memberikan dasar pendidikan sosial, dan
- 5) Meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak.

b. Lingkungan Sekolah

Tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam ketrampilan. Karena jika ditilik dari sejarah perkembangan profesi guru, tugas mengajar sebenarnya adalah pelimpahan dari tugas orang tua karena tidak mampu lagi memberikan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap-sikap tertentu sesuai dengan perkembangan zaman.

Fungsi Sekolah antara lain: (1) Sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik, (2) Sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah, (3) Sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca,

menulis, berhitung, menggambar serta ilmu-ilmu lain yang sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan, (4). Di sekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, membedakan moral, (5). Memelihara warisan budaya yang hidup dalam masyarakat dengan jalan menyampaikan warisan kebudayaan kepada generasi muda, dalam hal ini tentunya anak didik.

c. Lingkungan Organisasi Pemuda.

Peran organisasi pemuda yang terutama adalah mengupayakan pengembangan sosialisasi kehidupan pemuda. Melalui organisasi pemuda berkembanglah semacam kesadaran sosial, kecakapan-kecakapan di dalam pergaulan dengan sesama kawan (social skill) dan sikap yang tepat di dalam membina hubungan dengan sesama manusia (social attitude).

Ki Hajar Dewantara senantiasa melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologiknya, karena manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitikberatkan pada satu

daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Dan ternyata pendidikan sampai sekarang ini hanya menekankan pada pengembangan daya cipta, dan kurang memperhatikan pengembangan olah rasa dan karsa. Jika berlanjut terus akan menjadikan manusia kurang humanis atau manusiawi. Dari titik pandang sosio-anthropologis, kekhasan manusia yang membedakannya dengan makhluk lain adalah bahwa manusia itu berbudaya, sedangkan makhluk lainnya tidak berbudaya. Maka salah satu cara yang efektif untuk menjadikan manusia lebih manusiawi adalah dengan mengembangkan kebudayaannya. Persoalannya budaya dalam masyarakat itu berbeda-beda.

Ki Hajar Dewantara sendiri dengan mengubah namanya ingin menunjukkan perubahan sikapnya dalam melaksanakan pendidikan yaitu dari satria pinandita ke pinandita satria yaitu dari pahlawan yang berwatak guru spiritual ke guru spiritual yang berjiwa ksatria, yang mempersiapkan diri dan peserta didik untuk melindungi

bangsa dan negara. Bagi Ki Hajar Dewantara, para guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan kerohanian, baru kemudian menyediakan diri untuk menjadi pahlawan dan juga menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa.

Dengan kata lain, yang diutamakan sebagai pendidik pertama-tama adalah fungsinya sebagai model atau figure keteladanan, baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar. Oleh karena itu, nama Hajar Dewantara sendiri memiliki makna sebagai guru yang mengajarkan kebaikan, keluhuran, keutamaan. Pendidik atau Sang Hajar adalah seseorang yang memiliki kelebihan di bidang keagamaan dan keimanan, sekaligus masalah-masalah kemasyarakatan. Modelnya adalah Kyai Semar yang sukses menjadi perantara antara Tuhan dan manusia, mewujudkan kehendak Tuhan di dunia ini. Sebagai pendidik yang merupakan perantara Tuhan maka guru sejati sebenarnya adalah berwatak pandita juga, yaitu mampu menyampaikan kehendak Tuhan dan membawa keselamatan. Manusia merdeka adalah tujuan dari pendidikan nasional kita. Merdeka baik secara fisik, mental dan kerohanian. Suasana yang dibutuhkan dalam dunia

pendidikan adalah suasana yang berprinsip pada kekeluargaan, kebaikan hati, empati, cintakasih dan penghargaan terhadap masing-masing anggotanya.

Maka hak setiap individu hendaknya dihormati; pendidikan hendaknya membantu peserta didik untuk menjadi merdeka dan independen secara fisik, mental dan spiritual. Pendidikan juga hendaknya tidak hanya sekedar mengembangkan aspek intelektual sebab akan memisahkan dari orang kebanyakan. Pendidikan hendaknya memperkaya setiap individu tetapi perbedaan antara masing-masing pribadi harus tetap dipertimbangkan. Pendidikan hendaknya memperkuat rasa percaya diri, mengembangkan hara diri. Setiap orang harus hidup sederhana dan guru hendaknya rela mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadinya demi kebahagiaan para peserta didiknya.

Metode yang sesuai dengan sistem pendidikan ini menurut Ki Hajar adalah sistem among yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah dan asuh (care and dedication based on love). Guru yang efektif memiliki keunggulan dalam mengajar (fasilitator); dalam hubungan (relasi dan komunikasi)

dengan peserta didik dan anggota komunitas sekolah; dan juga relasi dan komunikasinya dengan pihak lain (orang tua, komite sekolah, pihak terkait); segi administrasi sebagai guru; dan sikap profesionalitasnya. Sikap-sikap profesional itu meliputi antara lain: keinginan untuk memperbaiki diri dan keinginan untuk mengikuti perkembangan zaman. Maka penting pula membangun suatu etos kerja yang positif yaitu: menjunjung tinggi pekerjaan; menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan, dan keinginan untuk melayani masyarakat.

Dalam kaitan dengan ini penting juga performance/penampilan seorang profesional: secara fisik, intelektual, relasi sosial, kepribadian, nilai-nilai dan kerohanian serta mampu menjadi motivator. Singkatnya perlu adanya peningkatan mutu kinerja yang profesional, produktif dan kolaboratif demi pemanusiaan secara utuh setiap peserta didik.

Ketika Soewardi kembali dari pengasingan Negara Belanda ke Indonesia pada bulan September 1919. Segera kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia

dirikan pada tanggal 3 Juli 1922: Nationaal Onderwijs Instituut Tamansiswa atau Perguruan Nasional Tamansiswa. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*. ("di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan"). Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia, terlebih di sekolah-sekolah Perguruan Tamansiswa.

Semboyan itu menggambarkan peran seorang guru atau pendidik dalam dunia pendidikan. Kumpulan peran yang cukup lengkap, yaitu: menjadi teladan, memberikan semangat, dan memberikan dorongan. Luar biasa sebenarnya seorang guru itu, bila dimaknai dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan berpengaruh sangat bagus kepada anak didiknya. Dari ketiga semboyan tersebut yang paling banyak kita kenal sekarang adalah *Tut Wuri Handayani*, biasanya tertulis di topi siswa SD sampai dengan SLTA. Tapi sampai sekarang saya tidak tau (entah lupa atau tidak pernah tahu) kenapa yang lebih

populer semboyan Tut Wuri Handayani (dari belakang mendorong) bukan Ing Ngarso Sungtulodo (dari depan memberikan teladan) ataupun Ing Madya Mangunkarso (dari tengah memberikan semangat).

Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam pendidikan perlu ditanamkan sejak dini bahwa keberadaan seorang pribadi, jauh lebih penting dan tentu tidak persis sama dengan apa yang menjadi miliknya dan apa yang telah dilakukannya. Sebab manusia tidak sekedar pemilik kekayaan dan juga menjalankan suatu fungsi tertentu. Pendidikan yang humanis menekankan pentingnya pelestarian eksistensi manusia, dalam arti membantu manusia lebih manusiawi, lebih berbudaya, sebagai manusia yang utuh berkembang. Inilah yang menurut Ki Hajar Dewantara harus dikembangkan karena pendidikan juga menyangkut daya cipta (kognitif), daya rasa (afektif), dan daya karsa (konatif). Singkatnya, "*educate the head, the heart, and the hand!*"

Pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi individu (peserta didik) baik potensi fisik maupun potensi cipta, rasa, maupun karsanya agar potensi itu menjadi nyata dan dapat

berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Filsafat erat kaitannya dengan pendidikan, karena filsafat merupakan akar dari segala macam ilmu termasuk ilmu pendidikan. Peranan filsafat sangat terlihat dari digunakannya filsafat sebagai cara pandang dalam memecahkan permasalahan yang tidak bisa diatasi dengan teoritik. Salah satu tokoh yang dapat direpresentasikan dengan pendidikan di Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Tidak dipungkiri bahwa beliau memiliki andil yang besar dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Hal ini dipastikan dengan diraihnya gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional, dan tanggal lahirnya yakni, 2 Mei diperingati sebagai hari Pendidikan Nasional. Sebelum menelisik jauh filsafat Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan di Indonesia kita telisik dulu makna filsafat dari nama Ki Hajar.

Nama Hajar Dewantara sendiri memiliki makna sebagai guru yang mengajarkan kebaikan, keluhuran, keutamaan. Pendidik atau Sang Hajar adalah seseorang yang memiliki kelebihan di bidang keagamaan dan keimanan, sekaligus masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sebagai pendidik yang merupakan

perantara Tuhan maka guru sejati seharusnya berwatak pandita, yaitu mampu menyampaikan kehendak Tuhan dan membawa keselamatan. Semboyan pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara adalah "*Ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*", yang dapat diartikan sebagai: Ing ngarso sung tulodho: seorang pemimpin apabila di depan harus bisa memberikan contoh atau menjadi panutan bagi yang dipimpin (warga atau peserta didik). Ing madyo mangun karso: seorang pemimpin apabila berada di tengah-tengah masyarakat harus bisa membangkitkan semangat atau memberi motivasi supaya lebih maju, atau lebih baik.

Tut wuri handayani: seorang pemimpin apabila berada di belakang harus bisa mendorong yang dipimpin supaya senantiasa lebih maju. Dasar yang paling penting dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah adanya persamaan persepsi antara penegak atau pemimpin pendidikan tentang arti "mendidik" itu sendiri. Beliau menyatakan bahwa mendidik itu bersifat humanisasi, yakni mendidik adalah proses memanusiakan manusia dengan adanya pendidikan diharapkan derajat hidup manusia bisa bergerak vertikal ke atas ke taraf

insani yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ada dua hal yang harus dibedakan yaitu, “Pengajaran” dan “Pendidikan” yang harus bersinergis satu sama lain. Adapun menurut beliau pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah (kemiskinan dan kebodohan). Sedangkan pendidikan mengarah pada memerdekakan manusia dari aspek hidup batin (otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, mentalitas demokratik).

Jadi jelaslah bahwa manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya secara lahir dan batin tidak terganggu kepada orang lain, akan tetapi ia mampu bersandar dan berdiri di atas kakinya sendiri. Artinya sistem pendidikan itu mampu menjadikan setiap individu hidup mandiri dan berpikir sendiri. Sistem pendidikan yang sebenarnya adalah bersifat mengasuh, melindungi, dan meneladani. Maka untuk dapat mencapai ini perlulah ketetapan pikiran dan batin yang akan menentukan kualitas seseorang sehingga rasa mantap tadi dapat tercapai. “Sifat umum pendidikan yang beliau canangkan adalah segala daya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter),

pikiran, (intellect), dan tubuh anak: dalam pengertian taman siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagianbagian itu, agar supaya kita memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anakanak yang kita didik selaras dengan dunia-nya.” Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa makna kata pendidikan jauh lebih luas daripada pengajaran. Pendidikan mencakup manusia seutuhnya, baik itu pendidikan intelektual, moralitas (nilai-nilai), dan budi pekerti.

Pendidikan menurut paham ini adalah pendidikan yang beralaskan garis-hidup dari bangsanya dan ditujukan untuk keperluan prikehidupan yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya, agar dapat bekerja bersama-sama dengan bangsa lain demi kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia. Konsepkonsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat diterjemahkan bahwasanya pendidikan di Indonesia haruslah memiliki tiga landasan filosofis, yaitu: nasionalistik maksudnya adalah budaya nasional, bangsa yang merdeka dan independen baik secara politis, ekonomis, universalistik dan spiritualistik. Universal artinya berdasarkan pada hukum alam, segala sesuatu merupakan perwujudan dari kehendak Tuhan.

Prinsip dasarnya adalah kemerdekaan, pendidikan hendaknya membantu peserta didik untuk menjadi merdeka dan independen secara fisik dan mental. Spiritual, yaitu pendidikan hendaknya tidak hanya mengembangkan aspek intelektual saja namun pendidikan hendaknya juga memperkuat rasa percaya diri, dan mengembangkan harga diri. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara metode yang sesuai dengan sistem pendidikan ini adalah sistem among, yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah, dan asuh. Metode ini secara teknik pengajaran meliputi kepala, hati, dan panca indera.

Sehingga output pendidikan yang dihasilkan adalah peserta didik yang berkepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi anggota masyarakat yang berguna, dan bertanggungjawab atas kebahagiaan dirinya dan kesejahteraan orang lain. Orientasi asas dan dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara diupayakan sebagai asas perjuangan yang diperlukan pada waktu itu.

Pengaruh pemikiran pertama dalam pendidikan adalah dasar kemerdekaan bagi tiap-tiap orang untuk mengatur dirinya sendiri. Bila diterapkan kepada

pelaksanaan pengajaran maka hal itu merupakan upaya di dalam mendidik peserta didik supaya dapat berperasaan, berpikiran dan bekerja merdeka demi pencapaian tujuannya dan perlunya kemajuan sejati untuk diperoleh dalam perkembangan kodrati. Hak mengatur diri sendiri berdiri bersama dengan tertib, damai dan bertumbuh menurut kodrat.

Ketiga hal ini merupakan dasar alat pendidikan bagi anak-anak yang disebut “among metode”, yang salah satunya ialah mewajibkan guru-guru sebagai pemimpin yang berdiri di belakang tetapi mempengaruhi dengan memberi kesempatan anak didik untuk berjalan sendiri. Maka dengan demikian pendidikan di Indonesia akan tetap dan selalu berproses berdasarkan semboyan “Ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani”.

Pemimpin apabila berada di belakang harus bisa mendorong yang dipimpin supaya senantiasa lebih maju. Dasar yang paling penting dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah adanya persamaan persepsi antara penegak atau pemimpin pendidikan tentang arti “mendidik” itu sendiri. Beliau menyatakan bahwa

mendidik itu bersifat humanisasi, yakni mendidik adalah proses memanusiakan manusia dengan adanya pendidikan diharapkan derajat hidup manusia bisa bergerak vertikal ke atas ke taraf insani yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ada dua hal yang harus dibedakan yaitu, “Pengajaran” dan “Pendidikan” yang harus bersinergis satu sama lain.

Adapun menurut beliau pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah (kemiskinan dan kebodohan). Sedangkan pendidikan mengarah pada memerdekakan manusia dari aspek hidup batin (otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, mentalitas demokratik). Jadi jelaslah bahwa manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya secara lahir dan batin tidak terganggu kepada orang lain, akan tetapi ia mampu bersandar dan berdiri di atas kakinya sendiri. Artinya sistem pendidikan itu mampu menjadikan setiap individu hidup mandiri dan berpikir sendiri. Sistem pendidikan yang sebenarnya adalah bersifat mengasuh, melindungi, dan meneladani.

Maka untuk dapat mencapai ini perlulah ketetapan pikiran dan batin yang akan menentukan kualitas seseorang sehingga rasa mantap tadi dapat tercapai. "Sifat umum pendidikan yang beliau canangkan adalah segala daya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran, (intellect), dan tubuh anak: dalam pengertian taman siswa tidak boleh dipisahkan bagianbagian itu, agar supaya kita memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anakanak yang kita didik selaras dengan dunia-nya." Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa makna kata pendidikan jauh lebih luas daripada pengajaran. Pendidikan mencakup manusia seutuhnya, baik itu pendidikan intelektual, moralitas (nilai-nilai), dan budi pekerti.

Pendidikan menurut paham ini adalah pendidikan yang beralaskan garis-hidup dari bangsanya dan ditujukan untuk keperluan prikehidupan yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya, agar dapat bekerja bersama-sama dengan bangsa lain demi kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia. Konsepkonsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat diterjemahkan bahwasanya

pendidikan di Indonesia haruslah memiliki tiga landasan filosofis, yaitu: nasionalistik maksudnya adalah budaya nasional, bangsa yang merdeka dan independen baik secara politis, ekonomis, universalistik dan spiritualistik. Universal artinya berdasarkan pada hukum alam, segala sesuatu merupakan perwujudan dari kehendak Tuhan.

Prinsip dasarnya adalah kemerdekaan, pendidikan hendaknya membantu peserta didik untuk menjadi merdeka dan independen secara fisik dan mental. Spiritual, yaitu pendidikan hendaknya tidak hanya mengembangkan aspek intelektual saja namun pendidikan hendaknya juga memperkuat rasa percaya diri, dan mengembangkan harga diri.

Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara metode yang sesuai dengan sistem pendidikan ini adalah sistem among, yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah, dan asuh. Metode ini secara teknik pengajaran meliputi kepala, hati, dan panca indera. Sehingga output pendidikan yang dihasilkan adalah peserta didik yang berkepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi anggota masyarakat yang berguna, dan bertanggungjawab atas kebahagiaan dirinya

dan kesejahteraan orang lain. Orientasi asas dan dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara diupayakan sebagai asas perjuangan yang diperlukan pada waktu itu. Pengaruh pemikiran pertama dalam pendidikan adalah dasar kemerdekaan bagi tiap-tiap orang untuk mengatur dirinya sendiri. Bila diterapkan kepada pelaksanaan pengajaran maka hal itu merupakan upaya di dalam mendidik peserta didik supaya dapat berperasaan, berpikiran dan bekerja merdeka demi pencapaian tujuannya dan perlunya kemajuan sejati untuk diperoleh dalam perkembangan kodrati. Hak mengatur diri sendiri berdiri bersama dengan tertib, damai dan bertumbuh menurut kodrat. Ketiga hal ini merupakan dasar alat pendidikan bagi anak-anak yang disebut “among metode”, yang salah satu seginya ialah mewajibkan guru-guru sebagai pemimpin yang berdiri di belakang tetapi mempengaruhi dengan memberi kesempatan anak didik untuk berjalan sendiri. Maka dengan demikian pendidikan di Indonesia akan tetap dan selalu berproses berdasarkan semboyan “Ing ngarso sung tulodho, ing madyo manguk karso, tut wuri handayani”.

Guru yang efektif memiliki keunggulan dalam mengajar (fasilitator); dalam hubungan (relasi dan komunikasi) dengan peserta didik dan anggota komunitas sekolah; dan juga relasi dan komunikasinya dengan pihak lain (orang tua, komite sekolah, pihak terkait); segi administrasi sebagai guru; dan sikap profesionalitasnya. Sikap-sikap profesional itu meliputi antara lain: keinginan untuk memperbaiki diri dan keinginan untuk mengikuti perkembangan zaman. Maka penting pula membangun suatu etos kerja yang positif yaitu: menjunjung tinggi pekerjaan; menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan, dan keinginan untuk melayani masyarakat. Dalam kaitan dengan ini penting juga performance/penampilan seorang profesional: secara fisik, intelektual, relasi sosial, kepribadian, nilai-nilai dan kerohanian serta mampu menjadi motivator. Singkatnya perlu adanya peningkatan mutu kinerja yang profesional, produktif dan kolaboratif demi pemanusiaan secara utuh setiap peserta didik.

B. Impilkasi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara

Dasar yang paling penting dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah adanya persamaan persepsi antara penegak atau pemimpin pendidikan tentang arti “mendidik” itu sendiri. Beliau menyatakan bahwa mendidik itu bersifat humanisasi, yakni mendidik adalah proses memanusiakan manusia dengan adanya pendidikan diharapkan derajat hidup manusia bisa bergerak vertikal ke atas ke taraf insani yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ada dua hal yang harus dibedakan yaitu, “Pengajaran” dan “Pendidikan” yang harus bersinergis satu sama lain.

Adapun menurut beliau pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah (kemiskinan dan kebodohan). Sedangkan pendidikan mengarah pada memerdekakan manusia dari aspek hidup batin (otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, mentalitas demokratik). Jadi jelaslah bahwa manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya secara lahir dan batin tidak terganggu kepada orang lain, akan tetapi ia mampu bersandar dan berdiri di atas

kakinya sendiri. Artinya sistem pendidikan itu mampu menjadikan setiap individu hidup mandiri dan berpikir sendiri.

Ki Hadjar Dewantara mengatakan bahwa; Pendidikan ialah usaha kebudayaan yang bermaksud memberi bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak agar dalam kodrat pribadinya serta pengaruh lingkungannya, mereka memperoleh kemajuan lahir batin menuju ke arah adab kemanusiaan (Ki Suratman, 1987: 12).

Sedang yang dimaksud adab kemanusiaan adalah tingkatan tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia yang berkembang selama hidupnya. Artinya dalam upaya mencapai kepribadian seseorang atau karakter seseorang, maka adab kemanusiaan adalah tingkat yang tertinggi. Dari definisi pendidikan tersebut terdapat dua kalimat kunci yaitu; „tumbuhnya jiwa raga anak“ dan „kemajuan anak lahir-batin“. Dari dua kalimat kunci tersebut dapat dimaknai bahwa manusia bereksistensi ragawi dan rokhani atau berwujud raga dan jiwa. Adapun pengertian jiwa dalam budaya bangsa meliputi “ngerti, ngrasa, lan nglakoni” (cipta, rasa, dan karsa). Kalau digunakan dalam

istilah psikologi, ada kesesuaiannya dengan aspek atau domain kognitif, domain emosi, dan domain psikomotorik atau konatif.

Ki Hadjar Dewantara lebih lanjut menegaskan bahwa pendidikan itu suatu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Ini berarti bahwa hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak para pendidik. Anak itu sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai benda hidup teranglah hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Seperti yang termaktub di muka, maka apa yang dikatakan kekuatan kodrati yang ada pada anak itu tidak lain ialah segala kekuatan di dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu, yang ada karena kekuatan kodrat.

Kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatankekuatan itu, agar dapat memperbaiki lakunya (bukan dasarnya) hidup dan tumbuhnya itu. Dari konsepsi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Ki Hadjar Dewantara ingin; a) menempatkan anak didik sebagai pusat pendidikan, b) memandang pendidikan sebagai suatu proses yang dengan demikian bersifat dinamis, dan c) mengutamakan

keseimbangan antar cipta, rasa, dan karsa dalam diri anak. Dengan demikian pendidikan yang dimaksud oleh Ki Hadjar Dewantara memperhatikan keseimbangan cipta, rasa, dan karsa tidak hanya sekedar proses alih ilmu pengetahuan saja atau transfer of knowledge, tetapi sekaligus pendidikan juga sebagai proses transformasi nilai (*transformation of value*). Dengan kata lain pendidikan adalah proses pembentukan karakter manusia agar menjadi sebenar-benar manusia.

Dalam proses tumbuh kembangnya seorang anak, Ki Hadjar Dewantara memandang adanya tiga pusat pendidikan yang memiliki peranan besar. Semua ini disebut “Tripusat Pendidikan”. Tripusat Pendidikan mengakui adanya pusat-pusat pendidikan yaitu; 1) Pendidikan di lingkungan keluarga, 2) Pendidikan di lingkungan perguruan, dan 3) Pendidikan di lingkungan kemasyarakatan atau alam pemuda. Alam keluarga adalah pusat pendidikan yang pertama dan terpenting. Sejak timbul adab kemanusiaan hingga kini, hidup keluarga selalu mempengaruhi bertumbuhnya budi pekerti atau karakter dari tiap-tiap manusia. Alam perguruan merupakan pusat perguruan yang teristimewa

berkewajiban mengusahakan kecerdasan pikiran (perkembangan intelektual) beserta pemberian ilmu pengetahuan (balai-wiyata). Alam kemasyarakatan atau alam pemuda merupakan kancah pemuda untuk beraktivitas dan beraktualisasi diri mengembangkan potensi dirinya. Ketiga lingkungan pendidikan tersebut sangat erat kaitannya satu dengan lainnya, sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan, dan memerlukan kerjasama yang sebaik-baiknya, untuk memperoleh hasil pendidikan maksimal seperti yang dicita-citakan.

Hubungan sekolah (perguruan) dengan rumah anak didik sangat erat, sehingga berlangsungnya pendidikan terhadap anak selalu dapat diikuti serta diamati, agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pamong sebagai pimpinan harus bertindak tutwuri handayani, ing madya mangun karsa, dan ing ngarsa sung tuladha yaitu; mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, berada di tengah memberi semangat, berada di depan menjadi teladan.

BAB 10

KONSEP PENDIDIKAN BERBASIS MULTIKULTURAL ALA KI HAJA DEWANTARA

A. Konsep Pendidikan Multikultural

Menurut Banks, (1993) pembelajaran multikultural pada dasarnya merupakan program pendidikan bangsa agar komunitas multikultural dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang ideal bagi bangsanya. *“The term multicultural education (now) describes a wide variety of programs and practices related to educational equity, women, ethnic groups, language minorities, low-income groups, and people with disabilities”*.

Di sisi yang sama, menurut Zamroni (2011: 140) pendidikan multikultural merupakan bentuk reformasi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa tanpa memandang latar belakangnya, sehingga semua siswa dapat meningkatkan kemampuan yang seoptimal sesuai dengan ketertarikan, minat dan bakat yang dimilikinya.

Seide dengan Banks, Sleeter dan Grant (1988) mendefinisikan pembelajaran multikultural sebagai kebijakan dalam praktik pendidikan dalam mengakui, menerima dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang dikaitkan dengan gender, ras, kelas.

Lebih dari itu, pendidikan multikultural adalah suatu sikap dalam memandang keunikan manusia dengan tanpa membedakan ras, budaya, jenis kelamin, seks, kondisi jasmaniah atau status ekonomi seseorang (Skeel, 1995). Pendidikan multikultural (multicultural education) merupakan strategi pendidikan yang memanfaatkan keberagaman latar belakang kebudayaan dari para peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural. Strategi ini sangat bermanfaat, sekurang-kurangnya bagi sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat membentuk pemahaman bersama atas konsep kebudayaan, perbedaan budaya, keseimbangan, dan demokrasi dalam arti yang luas (Liliweri, 2005).

Dalam konteks keindonesiaan, pendidikan multikultural pada hakikatnya mencoba membantu menyatukan kesukuan, ras dan golongan secara lebih manusiawi, dengan menekankan pada perspektif

pluralitas kemasyarakatan. Dengan demikian, sekolah dikondisikan untuk mencerminkan praktik dari nilai-nilai pluralitas. Kurikulum di persekolahan pun harus diracik sedemikian rupa. Aneka kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat, bahasa, dan dialek di mana para pelajar lebih baik berbicara tentang rasa hormat di antara mereka dan menunjung tinggi nilai-nilai kerja sama, daripada membicarakan persaingan dan prasangka di antara sejumlah pelajar yang berbeda dalam hal ras, etnik, budaya dan kelompok status sosialnya perlu dimasukkan.

Pendidikan berbasis multikultural didasarkan pada gagasan filosofis tentang kebebasan, keadilan, kesederajatan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Hakikat pendidikan multikultural mempersiapkan seluruh siswa untuk bekerja secara aktif menuju kesamaan struktur dalam organisasi dan lembaga sekolah. Pendidikan multikultural bukanlah kebijakan yang mengarah pada pelembagaan pendidikan dan pengajaran inklusif dan pengajaran oleh propaganda pluralisme lewat kurikulum yang berperan bagi kompetisi budaya individual.

B. Pembelajaran Multikultural

Pembelajaran berbasis multikultural berusaha memberdayakan siswa untuk mengembangkan rasa hormat kepada orang yang berbeda budaya, memberi kesempatan untuk bekerja bersama dengan orang atau kelompok orang yang berbeda etnis atau rasnya secara langsung. Pendidikan multikultural juga membantu siswa untuk mengakui ketepatan dari pandangan-pandangan budaya yang beragam, membantu siswa dalam mengembangkan kebanggaan terhadap warisan budaya mereka, menyadarkan siswa bahwa konflik nilai sering menjadi penyebab konflik antar kelompok masyarakat (Savage & Armstrong, 1996). Pendidikan multikultural diselenggarakan dalam upaya mengembangkan kemampuan siswa dalam memandang kehidupan dari berbagai perspektif budaya yang berbeda dengan budaya yang mereka miliki, dan bersikap positif terhadap perbedaan budaya, ras, dan etnis. (Farris & Cooper, 1994).

Menurut James Banks (2003), pendidikan multikultural setidaknya mengandung empat dimensi pokok. Pertama, content integration, yaitu upaya mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk

mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu. Kedua, the knowledge construction process, yaitu suatu metode/cara bagaimana membawa siswa memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin). Ketiga, an equity pedagogy, yaitu usaha untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa yang beragam bagi dari segi ras, budaya ataupun sosial. Keempat, prejudice reduction, yaitu mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka, melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam menciptakan budaya akademik.

Tujuan pendidikan berbasis multikultural di antaranya; (1) untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam; (2) untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok keagamaan; (3) memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya; (4) untuk membantu peserta didik dalam membangun

ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok (Banks, dalam Skeel, 1995).

Di samping itu, pendidikan berbasis multikultural dibangun atas dasar konsep pendidikan untuk kebebasan (Dickerson, 1993; Banks, 1994); yang bertujuan untuk: (1) membantu siswa atau mahasiswa mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk berpartisipasi di dalam demokrasi dan kebebasan masyarakat; (2) memajukan kebebasan, kecakapan, keterampilan terhadap lintas batas-batas etnik dan budaya untuk berpartisipasi dalam beberapa kelompok dan budaya orang lain.

C. Sistem Pendidikan dan Pengajaran

Sistem pendidikan dan pengajaran Ki Hajar Dewantara mempunyai nilai-nilai filosofis yang mendalam dan sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan multikultural. Hal ini dapat dilihat secara jelas pada pandangan-pandangannya tentang pendidikan, baik pra kemerdekaan, mau pun pasca kemerdekaan. Sistem Among adalah idenya untuk memonitor dan berkomunikasi dengan siswa didiknya. Dalam hal ini sitem

among terdiri dua dasar, yaitu: Pertama, Kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir batin, hingga dapat hidup merdeka (dapat berdiri sendiri). Adanya dasar kemerdekaan adalah dasar suatu usaha untuk mendidik murid-murid agar bersikap mental, serta bekerja keras dalam batas-batas tujuan mencapai tertib damainya hidup bersama. Dalam hal ini bukan hanya dikenakan pada sikap perilaku, tetapi dilaksanakan pula pada kebebasan anak-anak untuk berpikir; Kedua, Kodrat alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa sistem pendidikan cara lama yang menggunakan perintah, paksaan, dan hukuman harus diganti dengan sistem pendidikan yang berdasar pada kodrat alam. Anak didik baru dapat berkembang secara optimal apabila ia diberi kebebasan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan pembawaan yang ada dalam dirinya (Media, Edisi Mei 1996: 39).

Sedangkan dasar pendidikan dan pengajaran dari Taman Siswa ialah “Panca Dharma Taman Siswa”, yang disusun pada tahun 1947. Dasar dasar itu ialah:

- a) Asas kemerdekaan, maksudnya bahwa disiplin pada diri sendiri oleh diri sendiri, atas dasar nilai hidup yang tinggi, baik hidup sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat
- b) Asas kodrat alam, berarti bahwa pada hakikatnya manusia itu sebagai makhluk adalah satu dengan kodrat alam ini. Ia tidak bisa lepas dari kehendaknya, tetapi akan mengalami bahagia, jika bisa menyatukan diri dengan kodrat alam yang mengandung kemajuan itu. Karena itu, hendaklah tiap anak dapat berkembang dengan sewajarnya
- c) Asas kebudayaan, hal ini tidak berarti asal memelihara kebudayaan kebangsaan, tetapi pertama-tama membawa kebudayaan kebangsaan ke arah kemajuan yang sesuai dengan kecerdasan zaman, kemajuan dunia, dan kepentingan hidup rakyat lahir batin. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menganjurkan untuk mengembangkan kebudayaan lokal dalam arti kebudayaan sendiri, di mana si anak tersebut tinggal
- d) Asas kebangsaan. Maksudnya, tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan, bahkan harus

menjadi bentuk dan perbuatan kemanusiaan yang nyata. Jelasnya, tidak mengandung arti permusuhan dengan bangsa lain, melainkan mengandung rasa satu dengan bangsa sendiri, rasa satu dalam suka dan duka, rasa satu dalam kehendak menuju ke arah kebahagiaan lahir batin seluruh bangsa;

- e) Asas kemanusiaan. Artinya, menyatakan bahwa dharma tiap-tiap manusia itu adalah mewujudkan kemanusiaan, yang harus terlihat pada kesucian hatinya dan adanya rasa cinta kasih terhadap sesama manusia dan terhadap makhluk Tuhan seluruhnya.

1. Sistem Among

Prinsip kemandirian di dalam proses pendidikan dikembangkan dalam sistem among. Among atau ngemong mempunyai arti yang sangat mendalam dalam proses pendidikan yang berkaitan dengan hakikat manusia yang tidak berdaya ketika dilahirkan. Namun demikian, ketidakberdayaan manusia merupakan suatu proses yang tertuju kepada kemandirian. Hal ini berarti dalam sistem among relasi antara pendidik dan peserta didik bukanlah merupakan relasi ketergantungan, tetapi suatu relasi yang

semakin lama semakin memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiri sendiri (Tilaar dan Rian Nugroho, 2008: 52).

Menurut pendapat Ki Hajar Dewantara, pendidikan dengan “Sistem Among” memakai cara pondok-asrama, karena dengan cara itu dapatlah ketiga lingkungan pendidikan bekerja bersama-sama yaitu lingkungan keluarga, perguruan, dan perkumpulan pemuda. Persatuan ketiga corak lingkungan pendidikan tersebut penting sekali untuk sempurnanya pendidikan (Sistem Tri Pusat Pendidikan). Model Tri Pusat Pendidikan ini meliputi alam keluarga, alam perguruan (sekolah) dan alam pemuda (masyarakat).

Alam keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan yang terpenting. Tugasnya adalah mendidik budi pekerti dan tingkah laku sosial. Alam perguruan merupakan pusat pendidikan yang berkewajiban untuk mengusahakan kecerdasan pikiran dan memberi ilmu pengetahuan. Alam pemuda merupakan pusat pendidikan yang membantu menuju kecerdasan jiwa maupun budi pekerti. Sistem pendidikan yang mengemukakan adanya

tiga pusat pendidikan itulah yang dinamakan “Sistem Tri Pusat” (Soeratman, 1983/1984: 85).

2. Prinsip Kebudayaan

Menurut Ki Hadjar Dewantara, kebudayaan itu berarti buah budi manusia. Budi adalah jiwa yang sudah masak, sudah cerdas dan mempunyai dua sifat yang istimewa, yaitu sifat luhur dan sifat halus, maka segala ciptaannya senantiasa mempunyai sifat luhur dan halus pula, sesuai dengan pelajaran etika dan estetika. Kebudayaan juga bisa dimaknai sebagai kemenangan atau hasil perjuangan hidup manusia, yaitu dalam perjuangannya terhadap dua kekuatan yang kuat dan abadi, yakni alam dan zaman, dalam perjuangan manusia tetap dan terus menerus berhasrat mengatasi segala pengaruh alam dan zaman yang menyukarkan hidupnya lahir dan batin, maka kebudayaan itu bersifat menggampangkan hidupnya serta memperbesar hasil hidupnya (Dewantara, 77, 54).

Bahkan Ki Hadjar Dewantara menegaskan bahwa kebudayaan bukan hanya mengandung buah budi, tetapi juga memiliki arti memelihara dan memajukan. Dari sifat kodrati ke arah sifat kebudayaan. Itulah tujuan daripada segala usaha kultural. Acap kali suatu bangsa itu hanya

mementingkan sifat keindahan atau kemegahan yang terdapat pada suatu benda kebudayaan (benda lahir atau batin) hingga lupa akan hubungan kebudayaan dengan masyarakat yang hidup pada suatu zaman. Banyak bentuk-bentuk kebudayaan yang sebenarnya telah terlepas daripada zaman dan alamnya, dari kodrat dan masyarakatnya, tidak berfaedah lagi bagi hidup manusia, akan tetapi masih tetap terus dipujipuji (Dewantara, 77, 54).

D. Implementasi Pendidikan Multikultural Melalui Konsep Tri Pusat Pendidikan

Implementasi pendidikan multikultural di berbagai negara memang sulit dilaksanakan, tidak terkecuali di Indonesia. Berbagai langkah, strategi dan metode telah ditempuh, tapi hasilnya seolah masih jauh dari kata memuaskan. Menurut hemat saya, percepatan pemahaman dan pelaksanaan pendidikan multikultural dapat berjalan secara signifikan, jika konsep Tri Pusat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara dapat diterapkan. Mengapa demikian? Karena esensi pemahaman

multikultural adalah transformasi kesadaran diri. Dan kesadaran diri tersebut, dapat secara efektif di ajarkan secara simultan, mulai dari rumah, sekolah dan masyarakat. Adapun langkah dan strateginya sebagai berikut:

1. Pendidikan Berbasis Multikultural Di Rumah

Barangkali ada yang berpikir mungkinkah pendidikan multikultural diajarkan di rumah? Jawabnya, tentu sangat mungkin. Bahkan, bisa dikatakan wajib diajarkan. Keragaman suku, budaya, warna kulit, strata sosial, keyakinan dan nilai-nilai kemanusiaan sangat mungkin diajarkan dan didiskusikan di lingkungan keluarga. Apalagi, jika di dalam keluarga tersebut ada pembantu yang bekerja melayani keperluan keseharian mereka. Ia, bisa dijadikan contoh konkret bagaimana pembantu tersebut dihormati dan dipenuhi hak-haknya. Bahkan menurut Ki Hadjar Dewantara, alam (lingkungan) keluarga adalah tempat pendidikan yang pertama kali bagi kehidupan anak-anak. Di alam keluarga, ada tiga bentuk pendidikan berlangsung. Pertama, pendidikan yang dilakukan oleh orang tua. Ia berperan sebagai guru (penuntun), pengajar, dan pemimpin pekerjaan (pemberi

contoh). Ketiga peran tersebut, menyatu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kedua, di dalam alam keluarga anak saling mendidik. Semakin keluarga itu besar, maka proses pendidikan semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil keluarganya, maka proses pendidikan semakin kecil. Ketiga, di dalam alam keluarga, anakanak berkesempatan mendidik dirinya sendiri, karena di dalam keluarga itu mereka tidak berbeda kedudukannya seperti orang hidup di dalam masyarakat. Beragam kejadian, sering kali memaksa anak-anak mendidik diri mereka sendiri. (Dewantara, 1935: 377).

Berkaitan dengan ketiga domain tersebut, bukan tidak mungkin para orang tua dapat memerankan diri mereka sebagai penuntun multikultural yang baik. Di bilik-bilik ruang keluarga, pendidikan multikultural begitu sangat indah. Wujud nyatanya, sangat mudah dilaksanakan oleh semua kalangan. Adalah sebuah kelaziman, jika *democratic parents*, akan mengarah pada pengembangan *identity achievement*. (Zamroni, 6/5/2011). Persoalannya, tinggal mau atau tidak melaksanakan semua itu.

2. Pendidikan Berbasis Multikultural di Sekolah

Masyarakat multikultural merupakan suatu realitas. Hampir tidak ada suatu masyarakat yang bersifat monokultur. Bahkan sejarah telah menunjukkan setiap upaya untuk menciptakan “monokultur” dengan berbagai macam bentuk telah gagal. Karena pada hakekatnya, masyarakat multikultur merupakan sunatullah (Zamroni, 2011: 31). Dengan alasan tersebut, tentu sangat rasional jika dunia persekolahan kita mencari format pendidikan yang empan papan bagi semua lapisan masyarakat. Khususnya, pendidikan yang dapat menghargai perbedaan suku, ras, agama, budaya dan adat-istiadat masyarakat. Pendidikan multikultur pun bisa menjadi salah satu solusi alternatifnya.

Dalam konteks itu, James A. Banks (1993, 1994-a), mengidentifikasi ada lima dimensi pendidikan multikultural yang diperkirakan dapat membantu guru dalam mengimplementasikan beberapa program yang mampu merespon terhadap perbedaan pelajar (siswa), yaitu:

Pertama, dimensi integrasi isi/materi (content integration). Dimensi ini digunakan oleh guru untuk

memberikan keterangan dengan 'poin kunci' pembelajaran dengan merefleksi materi yang berbeda-beda. Secara khusus, para guru menggabungkan kandungan materi pembelajaran ke dalam kurikulum dengan beberapa cara pandang yang beragam. Salah satu pendekatan umum adalah mengakui kontribusinya, yaitu guru-guru bekerja ke dalam kurikulum mereka dengan membatasi fakta tentang semangat kepahlawanan dari berbagai kelompok. Di samping itu, rancangan pembelajaran dan unit pembelajarannya tidak dirubah. Dengan beberapa pendekatan, guru menambah beberapa unit atau topik secara khusus yang berkaitan dengan materi multikultural.

Kedua, dimensi konstruksi pengetahuan (knowledge construction). Suatu dimensi di mana para guru membantu siswa untuk memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan yang mereka miliki. Dimensi ini juga berhubungan dengan pemahaman para pelajar terhadap perubahan pengetahuan yang ada pada diri mereka sendiri;

Ketiga, dimensi pengurangan prasangka (prejudice reduction). Guru melakukan banyak usaha untuk membantu siswa dalam mengembangkan perilaku positif tentang perbedaan kelompok. Sebagai contoh, ketika anak-anak masuk sekolah dengan perilaku negatif dan memiliki kesalahpahaman terhadap ras atau etnik yang berbeda dan kelompok etnik lainnya, pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan perilaku intergroup yang lebih positif, penyediaan kondisi yang mapan dan pasti. Dua kondisi yang dimaksud adalah bahan pembelajaran yang memiliki citra yang positif tentang perbedaan kelompok dan menggunakan bahan pembelajaran tersebut secara konsisten dan terus-menerus.

Penelitian menunjukkan bahwa para pelajar yang datang ke sekolah dengan banyak stereotipe, cenderung berperilaku negatif dan banyak melakukan kesalahpahaman terhadap kelompok etnik dan ras dari luar kelompoknya. Penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan teksbook multikultural atau bahan pengajaran lain dan strategi pembelajaran yang kooperatif dapat membantu para pelajar untuk mengembangkan perilaku dan persepsi terhadap ras yang lebih positif. Jenis

strategi dan bahan dapat menghasilkan pilihan para pelajar untuk lebih bersahabat dengan ras luar, etnik dan kelompok budaya lain.

Keempat, dimensi pendidikan yang sama, atau adil (*equitable pedagogy*). Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada sejumlah siswa dari berbagai kelompok. Strategi dan aktivitas belajar yang dapat digunakan sebagai upaya memperlakukan pendidikan secara adil, antara lain dengan bentuk kerjasama (*cooperative learning*), dan bukan dengan cara-cara yang kompetitif (*competition learning*). Dimensi ini juga menyangkut pendidikan yang dirancang untuk membentuk lingkungan sekolah, menjadi banyak jenis kelompok, termasuk kelompok etnik, wanita, dan para pelajar dengan kebutuhan khusus yang akan memberikan pengalaman pendidikan persamaan hak dan persamaan memperoleh kesempatan belajar.

Kelima, dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (*empowering school culture and social structure*). Dimensi ini penting dalam memperdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari

kelompok yang berbeda. Di samping itu, dapat digunakan untuk menyusun struktur sosial (sekolah) yang memanfaatkan potensi budaya siswa yang beranekaragam sebagai karakteristik struktur sekolah setempat, misalnya berkaitan dengan praktik kelompok, iklim sosial, latihan-latihan, partisipasi ekstra kurikuler dan penghargaan staff dalam merespon berbagai perbedaan yang ada di sekolah.

Dengan demikian, kelima dimensi tersebut sangat membantu proses pembelajaran di kelas. Pendekatan yang bisa dipakai dalam proses pembelajaran di kelas multikultural adalah dengan menggunakan pendekatan kajian kelompok tunggal (*Single Group Studies*) dan pendekatan perspektif ganda (*Multiple Perspectives Approach*).

Pendidikan multikultural di Indonesia pada umumnya memakai pendekatan kajian kelompok tunggal. Pendekatan ini dirancang untuk membantu siswa dalam mempelajari pandangan-pandangan kelompok tertentu secara lebih mendalam. Oleh karena itu, harus tersedia data-data tentang sejarah kelompok itu, kebiasaan, pakaian, rumah, makanan, agama yang dianut, dan tradisi lainnya. Data tentang kontribusi kelompok itu terhadap

perkembangan musik, sastra, ilmu pengetahuan, politik dan lain-lain harus dihadapkan pada siswa. Pendekatan ini terfokus pada isu-isu yang sarat dengan nilai-nilai kelompok yang sedang dikaji (Lubis Grafura, 2007: 10).

Sedangkan pendekatan perspektif ganda (Multiple Perspectives) adalah pendekatan yang terfokus pada isu tunggal yang dibahas dari berbagai perspektif kelompok-kelompok yang berbeda. Pada umumnya, guru-guru memiliki berbagai perspektif dalam pembelajarannya. Dalam kaitan ini, Bannet dan Spalding (1992, dalam Lubis

Grafura, 2007) menyarankan agar pembelajaran menggunakan pendekatan perspektif ganda, dengan alasan pendekatan itu nampak lebih efektif. Pendekatan perspektif ganda membantu siswa untuk menyadari bahwa suatu peristiwa umum sering diinterpretasikan secara berbeda oleh orang lain, di mana interpretasinya sering didasarkan atas nilai-nilai kelompok yang mereka ikuti.

Solusi yang dianggap baik oleh suatu kelompok (karena solusi itu sesuai dengan nilai-nilainya), sering tidak dianggap baik oleh kelompok lainnya karena tidak cocok dengan nilai yang diikutinya (Savage & Armstrong,

1996). Keunggulan pendekatan perspektif ganda ini terletak pada proses berpikir kritis terhadap isu yang sedang dibahas sehingga mendorong siswa untuk menghilangkan prasangka buruk. Interaksi dengan pandangan kelompok yang berbeda-beda memungkinkan siswa untuk berempati.

Lebih dari itu, hasil penelitian (Byrnes, 1988) membuktikan bahwa siswa yang rendah prasangkanya menunjukkan sikap yang lebih sensitif dan terbuka terhadap pandangan orang lain. Mereka juga mampu berpikir kritis, karena mereka lebih bersikap terbuka, fleksibel, dan menaruh hormat pada pendapat yang berbeda (Walsh, 1988). Bahan pelajaran dan aktivitas belajar yang kuat aspek afektifnya tentang kehidupan bersama dalam perbedaan kultur terbukti efektif untuk mengembangkan perspektif yang fleksibel (Byrnes, 1988).

Siswa yang memiliki rasa empati yang besar memungkinkan dia untuk menaruh rasa hormat terhadap perbedaan cara pandang. Tentu saja hal itu akan mampu mengurangi prasangka buruk terhadap kelompok lain. Membaca buku sastra multietnik dapat mengurangi stereotipe negatif tentang budaya orang lain (Walker-

Dalhouse, 1992). Pendekatan perspektif ganda mengandung dua sasaran yaitu meningkatkan empati dan menurunkan prasangka. Empati terhadap kultur yang berbeda merupakan prasyarat bagi upaya menurunkan prasangka.

Pertanyaan lanjutannya, bagaimana strateginya? Beragam strategi dapat digunakan, di antaranya strategi kegiatan belajar bersama-sama (Cooperative Learning), yang dipadukan dengan strategi pencapaian konsep (Concept Attainment) dan strategi analisis nilai (Value Analysis); strategi analisis sosial (Social Investigation). Beberapa Pilihan strategi ini dilaksanakan secara simultan, dan harus tergambar dalam langkah-langkah model pembelajaran berbasis multikultural. Namun demikian, masing-masing strategi pembelajaran secara fungsional memiliki tekanan yang berbeda.

Strategi Pencapaian Konsep, digunakan untuk memfasilitasi siswa dalam melakukan kegiatan eksplorasi budaya lokal untuk menemukan konsep budaya apa yang dianggap menarik bagi dirinya dari budaya daerah masing-masing, dan selanjutnya menggali nilai-nilai yang terkandung dalam budaya daerah asal tersebut. Strategi

cooperative learning, digunakan untuk menandai adanya perkembangan kemampuan siswa dalam belajar bersama-sama menso sia lisasikan konsep dan nilai budaya lokal dari daerahnya dalam komunitas belajar bersama teman. Dalam tataran belajar dengan pendekatan multikultural, penggunaan strategi *cooperative learning*, diharapkan mampu meningkatkan kadar partisipasi siswa dalam melakukan rekomendasi nilai-nilai lokal serta membangun cara pandang kebangsaan.

Dari kemampuan ini, siswa memiliki keterampilan mengembangkan kecakapan hidup dalam menghormati budaya lain, toleransi terhadap perbedaan, akomodatif, terbuka dan jujur dalam berinteraksi dengan teman (orang lain) yang berbeda suku, agama etnis dan budayanya, memiliki empati yang tinggi terhadap perbedaan budaya lain, dan mampu mengelola konflik dengan tanpa kekerasan (*conflict non violent*).

3. Pendidikan Berbasis Multikultural di Masyarakat

Transformasi masyarakat menuju pemahaman masyarakat multikultural menjadi keniscayaan. Apalagi, mencermati fenomena sosial kemasyarakatan belakangan ini sangat menyedihkan, kalau tidak dikatakan

membahayakan. Khususnya, bagi keutuhan kebinekaan dan Kebangsaan kita. Beragam kekerasan, ke rusuhan, konflik, dan anarkisme seolah tanpa putus. Sebut saja, kasus kekerasan warga dan aparat di PT Preport Papua, Mesuji Lampung, Sape di Bima Nusa Tenggara Barat dan lain sepadannya.

Parahnya lagi, masyarakat kita semakin menjauhi sifat kejujuran, akibatnya tidak ada lagi trust (kepercayaan) di antara mereka. Perkembangan lebih lanjut, suasana kekeluargaan dan persaudaraan sebagai satu bangsa sudah hampir punah, diganti dengan kebersamaan dan persaudaraan sempit yang berpusat pada keluarga (hubungan darah) atau kelompok. Musnahnya suasana kekeluargaan dan persaudaraan diiringi dengan menurunnya penghargaan atas martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna membawa nilai “kehidupan” manusia menjadi amat rendah (Zamroni, 2011: 92).

Tidak mudah memang mengembalikan nilai-nilai dan karakter Kebangsaan kita yang konon dikenal sebagai bangsa yang guyup, rukun, gotong royong, ramah tamah dan menjunjung tinggi keragaman dan perbedaan

(kebhinekaan). Tapi, kini karakter Kebangsaan itu mulai luntur dan menguap. Bahkan, sekarang bangsa kita lebih dikenal sebagai bangsa yang gemar “tawuran” dan kekerasan. Pendidikan multikultural pun bisa dijadikan salah satu bagian dari solusi alternatif untuk mengembalikan semangat Kebangsaan. Caranya bagaimana? Setidaknya ada tiga hal yang dapat dilakukan untuk mendorong terwujudnya pendidikan multikultural di masyarakat.

Pertama, kesadaran akan pentingnya pemahaman multikultural bagi kehidupan masyarakat. Ini berarti masyarakat disadarkan tentang pentingnya memandang keunikan manusia dengan tanpa membedakan agama, kepercayaan, ras, budaya, jenis kelamin, seks, kondisi jasmaniah dan status ekonomi seseorang. Strategi percepatan kesadaran ini dapat dilakukan melalui beragam cara sebut saja misalnya, melalui penyuluhan-penyuluhan, khutbah-khutbah keagamaan, dan KKN Tematik multikultural perguruan tinggi. Di sisi yang sama, untuk mengatasi beberapa daerah yang berkonflik akibat isu SARA, perlu didorong kembali terwujudnya rekonsiliasi bermakna. Atau meminjam istilahnya

Zamroni, rekonsiliasi yang memaafkan, tapi tidak melupakan kejadian masa lalu. Hal ini memang sulit dilaksanakan, namun harapan itu masih tetap terbuka lebar. Karena kodrat manusia adalah makhluk sosial, yang merindukan kedamaian dan ketenangan.

Kedua, adanya kebijakan desa berbasis multikultural. Kebijakan ini sebagai bentuk lanjutan dari penyadaran yang telah dilakukan, baik oleh aparatatur pemerintahan, kaum agamawan, maupun sivitas akademika perguruan tinggi. Sehingga penyadaran tersebut, perlu dijaga, dipupuk dan dibuatkan konsensus bersama. Wujud konsensus kolektif itu, berupa kebijakan berbasis multikultural. Produk konsensus tentu tergantung kearifan lokal masing-masing desa/ masyarakat. Contoh misalnya, kebijakan adanya forum kerukunan antar agama di desa, dibentuknya warung kerukunan beragama dan pemaksimalan program PMPM berasas kerukunan. Gagasan ini menjadi sangat relevan, mengingat berbagai kekerasan berbusanakan SARA biasanya teretas dari desa dan daerah. Dengan adanya, konsensus (kebijakan) ini, diharapkan dapat meminimalisir kekerasan atas nama

SARA berkembang dan beranak pinak di negara seribu satu etnik ini.

Ketiga, memupuk semangat resiliensi berbasis multikultural. Upaya ini menjadi sangat penting dilakukan, karena untuk menjaga tum buhnya kesadaran, konsensus kolektif berbasis multikultural, maka kedua hal itu perlu diikat. Sehingga dibutuhkan pengikat yang benar-benar kuat. Sangat bijak kiranya, tawaran Siti Irene Astuti untuk mengikat semangat multikultural dengan “tali resiliensi”. Mengapa demikian? Karena semangat resiliensi berarti adanya proses dinamis yang mengarah pada kemampuan yang positif untuk menyesuaikan diri dalam situasi yang sulit (Luthar, dkk, 2000). Apalagi, semangat reiliensi ditumbuh kembangkan di masyarakat yang berkonflik. Sebab fungsi resiliensi di antaranya adalah mengatasi kesulitan-kesulitan yang pernah dialami di masa kecil, mewujudkan masa dewasa yang diinginkan, melewati kesulitan-kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, bangkit kembali setelah mengalami kejadian traumatik atau kesulitan besar (Siti Irene Astuti D, 21/11/2011).

Secara praksis, tugas berat melaksanakan resiliensi ini pada hakikatnya adalah tanggung jawab semua warga. Sehingga warga masyarakat pun, harus dibekali pemahaman dan konsep resiliensi ini.

BAB 11

PENUTUP

A. Simpulan

Pendidikan multikultural yang diajarkan dan dikembangkan di sekolah memiliki relevansi dalam konteks Indonesia yang memiliki semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Semboyan ini dapat mengakomodasi secara proporsional, normatif dan demokratis bagi bangsa Indonesia. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu bangsa di dunia yang terdiri dari beragam suku dan ras memiliki budaya lokal, bahasa dan agama yang berbeda-beda namun dalam bingkai kesatuan Indonesia. Pluralitas merupakan realitas yang lekat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pluralitas lahir tanpa rekayasa, sebagai kehendak Tuhan yang tidak dapat ditolak.

Dalam keragaman tersebut terkandung kekayaan yang membuat hidup semakin bermakna, namun dalam keragaman juga terbuka peluang saling bersinggungan dan

terjadi konflik. Masyarakat multikultural harus memperoleh kesempatan yang baik untuk menjaga dan mengembangkan kearifan budaya lokal mereka ke arah kualitas dan pendayagunaan yang lebih baik. Unsur-unsur budaya lokal dapat bermanfaat bagi individu bahkan perlu dikembangkan lebih lanjut agar menjadi kebudayaan bangsa, memperkaya khazanah kebudayaan nasional.

Misi pokok yang terkandung adalah mentransformasikan kenyataan multikultural sebagai aset dan sumber kekuatan bangsa menjadikannya sebagai sinergi nasional, memperkuat aktivitas konvergensi keanekaragaman suatu bangsa. Membangun multikulturalisme pada prinsipnya adalah membangun dirinya, bangsa dan tanah air tanpa merasakan sebagai beban dan hambatan, namun didasarkan pada ikatan persatuan, kesatuan dan kebersamaan serta saling bekerja sama dalam membangun Indonesia yang maju, aman dan sejahteran.

Pendidikan multikultural yang bersifat sistemik dan holistik pada Sekolah Dasar perlu dikembangkan. Pendidikan multikultural di Sekolah Dasar dikemas berdasarkan karakter dan budaya bangsa Indonesia.

Pendidikan multikultural bertujuan membentuk pemikiran, sikap dan perilaku peserta didik lebih komperhensif dalam memandang keberagaman, sehingga mampu memunculkan toleransi. Peserta didik tidak menjadikan pluralism menjadi wahana pemicu konflik pemecah persatuan dan kesatuan, sebaliknya menjadikan modal kekayaan pemersatu bangsa. Dalam pelaksanaannya pendidikan multikultural di Sekolah Dasar dapat dilakukan melalui strategi pendekatan aditif dan peran serta pendidik pada proses pengintegrasian nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran. Selain itu pendidik harus cakap dalam penguasaan ilmu pengetahuan khususnya pendidikan multikultur dan mampu memilih materi sesuai yang sesuai pembelajaran di Sekolah Dasar. Kemudian perlu dukungan pemerintah di dalam kurikulum terkait pendidikan multikultural yang efektif sebagai kontribusi pembentukan “keikaan” di tengah “kebhinnekaan” yang benar-benar aktual tidak hanya sekedar jargon.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, 2015, Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius, Jakarta: PSAP.
- Akbar, S. 2010. Penelitian Tindakan Kelas Filosofi, Metodologi & Implementasi. Yogyakarta: Cipta Media Aksara.
- Aly, Abdullah, 2011, Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren: Telaah Terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi, 1996, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bell-Gredler, M.E. 1986. Learning and Instruction, New York: Macmillan Publishing.
- Brameld T 1965. Education as Power, New York: Macmillan Co.
- Budiningsih, A 2003. Teori Vygotsky dan Pendidikan, Yogyakarta: Pustekkom dan UT.
- De Porter, B. Reardon M, dan Sarah, singer-Nourie. 2010. Quantum Teaching. Jakarta: Kaifa.

- Djojonegoro, W. 1996. Lima puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia, Jakarta: Depdiknas.
- E. Slavin, Robert, 2011, Psikologi Pendidikan; Teori dan Praktik, terj. Marianto Samosir, Jakarta: Indeks.
- Hasyim, H.A. Dardi dan Hartono, Yudi, 2009, Pendidikan Multikultural di Sekolah, Surakarta: UPT penerbitan dan percetakan UNS.
- Herimanto, 2010, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Jakarta: PT Bumi Aksara,
- Isjoni. 2010. Cooperative Learning Efektifitas Pembelajaran Kelompok. Bandung: Alfabeta.
- Kamil, Sukron. 2002, Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ma'arif, Syamsul. 2005, Pendidikan Pluralisme di Indonesia, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Mahfud, Choirul, 2010, Pendidikan Multikultural, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Maksum, Ali, 2011, Pluralisme dan Multikulturalisme; Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia, Malang: Aditya Media Publishing.
- Maliki, Zainuddin. 2008. Sosiologi Pendidikan. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.

Naim, Ngainun dan Sauqi, Achmad, 2011, Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

Permendiknas No 19 Pasal 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi.

Rahman, Musthafa, 2011, Humanisasi Pendidikan Islam: Plus-minus Sistem Pendidikan pesantren, Semarang: Walisongo Press.

Rumadi. 2006. Membangun Demokrasi dari Bawah. Jakarta: PPSDM UIN Jakarta.

Rusman. 2011. Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Salmiwati, 2013, Urgensi Pendidikan Agama Islam dalam Pengembangan Nilai-Nilai Multikultural, Jurnal Al-Talim Vol. 20, No. 1.

Slavin R.E.&Madden N. A.1979. School Practices That Improve Race Relations. American Research Educational Journal.vol. 16 no. 2 169-180.

Slavin, R. E. 2005. Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik. Bandung: Nusa Media

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suryana, Yaya dan Rusdiana, H.A, 2015, Pendidikan Multikultural, Bandung: Pustaka Setia.

Tilaar, H.A.R. 2005. Manifesto Pendidikan Nasional: Tinjauan dan Perspektif Post Modernisme dan Studi Kultural. Jakarta: Kompas.

Wena, M. 2012. Strategi pembelajaran inovatif kontemporer. Jakarta: Bumi Aksara

Windati, Agnes. 2005, Hukum Berkeadilan Jender, Jakarta: Kompas.

Zamroni. 2011, Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural, Yogyakarta: Gavin Kalam Utama

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Noor Alfulaila, S. Pd. I, M. Pd lahir dari perkawinan Bapak H. Adrianopel Samudra dan Hj. Noor Alisah, pada tanggal 02 September 1983 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Setelah tamat MI/SD tahun 1995, ia melanjutkan ke MTs Al-Mawaddah, Ponorogo tahun 1995-1998, dan menyelesaikan pendidikan MA di Al-Mawaddah tahun 1998-2001, Ponorogo, Jawa Timur. Tahun 2001, ia melanjutkan studi ke Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, Jurusan Tadris Bahasa Inggris (TBI). Selama menjadi mahasiswa, ia pernah menjadi delegasi Indonesia melalui Youth Exchange Programme atau Pertukaran Pemuda Antar Negara ke Kanada yang diadakan oleh Kemempora RI, bersama 20 delegasi dari propinsi lainnya. Tahun 2007, ia melanjutkan studi ke jenjang s2 di Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta pada program studi Pendidikan Dasar (Dikdas) kerjasama Kementerian Agama

RI. Pada tahun 2021, ia berhasil menamatkan program doktoralnya di bidang Ilmu Pendidikan Konsentrasi Pendidikan Dasar di almamater yang sama yaitu Universitas Negeri Yogyakarta.

Kariernya dimulai dari beberapa kampus yang selama ini membesarkan namanya. Mulai bulan Agustus 2006-Agustus 2007, ia pernah menjadi dosen luar biasa di STAI Al-Jami Banjarmasin, selesai Magister, tahun 2009, ia menjadi pegawai tetap di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Selain menjadi ketua jurusan PGMI, penulis juga mengajar di Program pascasarjana UIN antasari, dan di Universitas Terbuka Banjarmasin.

Beberapa mata kuliah yang pernah diampunya hingga sekarang antara lain bahasa Indonesia, pembelajaran bahasa Indonesia MI, materi bahasa Indonesia MI, media pembelajaran, strategi dan metodologi pembelajaran, metode pengembangan bahasa, psikologi perkembangan anak dan bahasa Inggris.

Selain sebagai dosen, ia juga aktif mengikuti berbagai forum ilmiah, baik pada level nasional maupun internasional. Nara sumber di berbagai acara seminar,

pelatihan lokal, dan kajian ilmiah. Penulis juga salah satu Asesor pada Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) Propinsi Kalimantan Selatan sejak 2019-Sekarang. Dengan dukungan suami tercinta, Dr. Nashrullah, M. Pd, dan putra-putri terkasih, Noor Zaky Pettalolo, Raisa Suci Salsabila dan Nugraha Rafif Maulana, ia selalu berharap dapat memberikan yang terbaik bagi diri, keluarga, masyarakat, lembaga, agama, maupun bangsa dan negara.

Sebagai seorang akademisi, praktisi pendidikan, sekaligus penulis, ia telah melahirkan beberapa karya tulis baik yang berbentuk makalah, jurnal, maupun buku. Karya berbentuk jurnal diantaranya berjudul *The effectiveness of multicultural approach in writing achievement of indonesian language among elementary school students*, yang terbit pada Jurnal Internasional Bereputasi terindeks Scopus Q3 (Cakrawala Pendidikan, 2019) doi: 10.21831/cp.v38i2.23440. Karya buku yang pernah terbit *Pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014, Book Chapter yang berjudul *Memeluk Bumi, Menebarkan kebaikan*, Gorontalo, Ideas Publishing, 2021, Flipbook edisi multikultural, *Stop*

Bullying jadikan Kawan bukan lawan, Malang: Ahlimedia Press, 2021. Buku yang pernah dibuat berjudul: 1) *Filosofis dan Karakteristik Pendidikan Sekolah Dasar*” diterbitkan tahun 2021, 2) Buku monograf “Materi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Pendidikan Dasar” di terbitkan tahun 2021.

Apabila ingin menyampaikan kritik dan saran, dapat dikirim via email di: alfulailanoor@gmail.com. Kritik dan saran dari para pembaca yang budiman merupakan masukan yang sangat berharga bagi penulis untuk penyempurnaan dan perbaikan setiap karya penulis di waktu yang akan datang. Terimakasih.